RENCANA STRATEGIS

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUAHN PERIKANAN AMBON TAHUN 2020-2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NOMOR: SK.1253/BPPP/RC.221/VI/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2020 – 2024 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON NOMOR : 1168/ BPPP/RC.221/VII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2020 – 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan program Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020 – 2024

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tentang perubahan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor 1168/BPPP/RC.221/VII/2020 tentang Rencana Strategis Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2019, tentang pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan, 1995);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan,
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2011, tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan,
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/Per-BRSDM/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.
11. Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.311/BRSDM.5/RC.221/V/2021 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 622/BRSDM.05/RC.221/VII/2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2020 – 2024

Pasal 1

Mengubah Lampiran I, II dan II dalam pasal 4 keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon 1168/BPPP/RC.221VII/2020 tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020-2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Balai ini.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 07 Juni 2021

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN AMBON,

ABU BAKAR

Lampiran I.
Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Nomor:1253/BPPP/RC.221/VI/2021
Tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020-2024

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/ MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human–centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber–physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network*/komunikasi, sedangkan society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber–physical–human systems*. Pada era *society* 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga kesimbangan maupun keharmonisan

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*tranfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dibawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;

2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

B. Tujuan Penyusunan Renstra

Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi BPPP Ambon dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan periode 2020–2024 secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis, baik di dalam maupun antar sub-sektor terkait. Penyusunan Renstra BPPP Ambon mengacu kepada: 1) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025; 3) Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024; 4) Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024; dan Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Renstra BPPP Ambon berisikan penjelasan tentang struktur organisasi, sumberdaya manusia (SDM, sarana dan prasaran, anggaran), kinerja pada periode sebelumnya (2015 – 2019), uraian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP yang akan dilaksanakan oleh BPPP Ambon periode 2020–2024. Renstra ini disusun berdasarkan analisis strategis dan potensi, peluang, permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi pembangunan KP dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

C. Kondisi Umum

1. Organisasi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan BPSDM KP Nomor : 46/KEP-BPSDMKP/2014, tanggal 20 Mei 2014 mempunyai Wilayah Kerja meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Wilayah Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar sehingga untuk pemanfaatannya dituntut pula peningkatan keterampilan sumberdaya manusia yang berkompeten dan berdedikasi tinggi dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan program peningkatan sumberdaya manusia yang menjadi sasaran pokok kegiatan pembangunan bangsa ke depan.

Dengan makin meningkatnya Pembangunan Perikanan di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara maka BPPP Ambon semakin berperan untuk meningkatkan keterampilan para petugas pembangunan di bidang peningkatan SDM Perikanan. Hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan bagian integral dari pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.

a. Tugas Pokok

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Ambon menyelenggarakan fungsi (1) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan; (2) Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan; (3) Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan; (4) Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan; (5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan; (6) Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan; (7) Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; (8) Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta; dan (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugasnya melakukan adminstrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan. Seksi Program dengan tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran pelatihan dan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan. Seksi Pelatihan dengan tugas melakukan persiapan kegiatan pelatihan. Seksi Penyuluhan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi dan melakukan administrasi dengan penyuluh wilayah kerja. Sedangkan kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

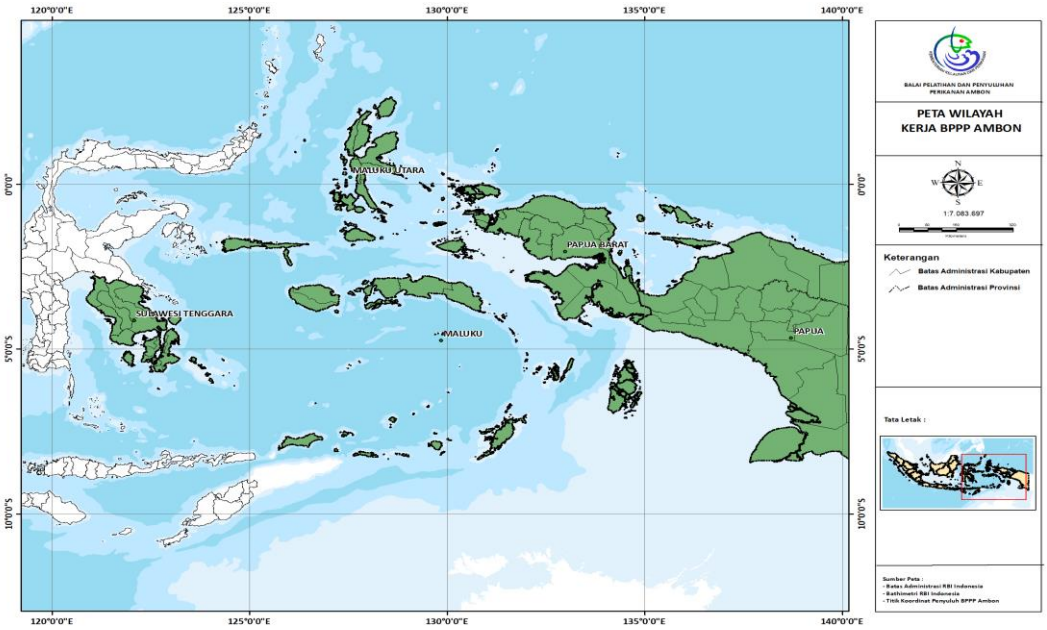

Gambar 1. Peta wilayah kerja BPPP Ambon

c. Susunan Organisasi

Gambaran Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dapat dilihat pada gambar berikut :

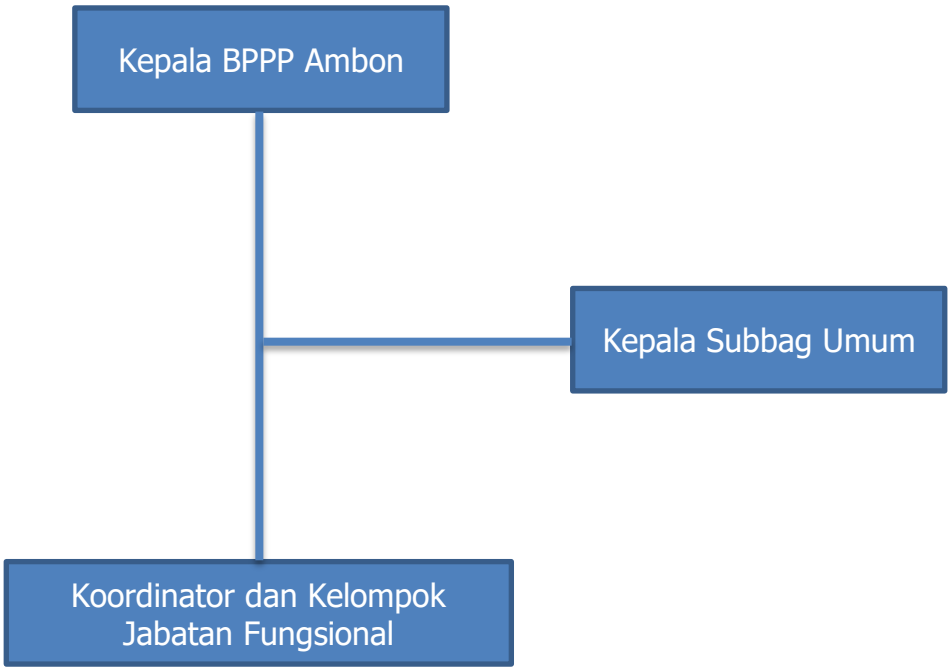

Gambar 2. Struktur Organisasi BPPP Ambon

2. Sumberdaya

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sejalan dengan visi dan misi KKP, kegiatan pelatihan dan penyuluhan juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sehingga keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menjadi sangatlah relevan.

a. Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Total Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon berjumlah 394 orang yang dipimpin oleh Kepala Balai, data pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. ***Jumlah SDM BPPP Ambon***

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	**Kepala Balai**	1 Orang
2	**Sub Koordinator**	4 Orang
3	**Sub Bagian Tata Usaha**	
	Kepegawaian	2 Orang
	Keuangan	4 Orang
	Rumah Tangga dan Perlengkapan	5 Orang
	Teknisi	5 Orang
4	**Seksi Program**	2 Orang
5	**Seksi Pelatihan**	1 Orang
6	**Seksi Penyuluhan**	2 Orang
7	**Fungsional Tertentu :**	
	Widyaiswara	5 Orang
	Instruktur	14 Orang
	Arsiparis	1 Orang
	Penyuluh	248 orang
8	**Tenaga Kontrak**	
	Tenaga Teknis	3 orang
	Pramubakti	6 orang
	Tenaga Sopir	2 orang
	Petugas Keamanan	3 orang
	Tenaga Dokter	1 orang
	Penyuluh Perikanan Bantu	85 orang
	Jumlah Total	**394 Orang**

Sumber : Kepegawaian BPPP Ambon

b. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana berupa aset yang dimiliki oleh BPPP Ambon meliputi aset terkait pelaksanaan fungsi pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan diantaranya gedung, asrama, ruang kelas, *workshop* dan sarana praktek untuk mendukung dalam menghasilkan sebuah output keluaran dari kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Aset BPPP Ambon tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran.

c. Capaian Program dan Kegiatan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sampai dengan saat ini telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM KP dengan capaian sebagai berikut:

1) Jumlah lulusan pelatihan masyarakat pada tahun 2020 sebanyak 1.165 orang. Adapun capaian kegiatan pelatihan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019, disajikan ke dalam tabel 3.

Tabel 2. *Jumlah lulusan pelatihan aparatur dan masyarakat tahun 2015 – 2020.*

Realisasi lulusan pelatihan (orang)											
2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat
307	2.665	275	2.540	0	840	120	1592	0	3.436	0	1.165

Sumber : Seksi Pelatihan BPPP Ambon

2) Jumlah kelompok mandiri pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok. Adapun jumlah kelompok pelaku utama kp wilayah Satminkal BPPP Ambon mulai dari tahun 2015 -2019 sebagaimana tersaji ke dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 3. *Jumlah kelompok pelaku utama KP , 2015 – 2020*

Satuan: Kelompok

No	Provinsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Maluku	912	1,059	978	786	786	885
2	Maluku Utara	1,060	1,147	630	425	425	629
3	Papua Barat	512	464	172	220	220	429
4	Papua	694	829	460	466	466	743
Jumlah		**3.178**	**3.499**	**2.240**	**1.897**	**1.897**	**2.686**

Sumber: Puslatluh KP dan Seksi Penyuluhan BPPP Ambon

3) Jumlah Sertifikasi kompetensi yang telah dihasilkan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 4.523 asesi. Data sertifikasi kompetensi menurut bidang kompetensi tahun 2015 – 2020, sebagaimana tabel dibawah

Tabel 4. *Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDMKP menurut Bidang Kompetensi Tahun 2015 – 2020*

No	Kompetensi	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Penangkapan Ikan	276	440	17	113	0	846
2	Budidaya Perikanan	336	160	398	81	20	995
3	Mesin Perikanan	186	170	55	0	0	411
4	Pengolahan Hasil Perikanan	869	260	370	126	280	1.905
5	Penyuluh Perikanan	0	0	0	0	0	0
6	Kelautan	202	60	0	0	0	82
7	Pengolahan Hasil Perikanan non konsumsi	84	20	0	0	0	104
	Jumlah	**1.953**	**1.110**	**840**	**320**	**300**	**4.523**

Sumber : LSP 1 BPPP - Ambon

d. Kondisi dan Sasaran

Penjabaran terkait dengan kondisi umum kegiatan pelatihan dan penyuluhan sekaligus sasarannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kondisi SDM Aparatur BPPP Ambon

Perkembangan jumlah SDM aparatur BPPP Ambon dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan jumlah pegawai yang memasuki masa purnabakti dan meninggal lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penambahan pegawai di BPPP Ambon. Tabel 5 menunjukkan perubahan jumlah total SDM aparatur KP BPPP Ambon.

Tabel 5. *Jumlah pegawai menurut unit kerja dan golongan lingkup BPPP Ambon, tahun 2015 – 2020*

2015				2016				2017				2018				2019				2020			
Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang			
I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	21	28	2	-	21	29	3	0	13	34	3	0	12	33	3	0	10	33	4	0	10	30	7
52				53				50				48				47				47			

Sumber: Kepegawaian BPPP Ambon

2) Penyuluh Perikanan Satminkal BPPP Ambon

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Namun dengan berjalannya waktu, ada beberapa penyuluh yang memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan beralih jabatan ke fungsional lainnya, sehingga saat ini jumlah Penyuluh Perikanan Wilayah Satminkal BPPP Ambon dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. *Jumlah SDM Penyuluh Perikanan PNS*

Satuan : Orang

No	PROVINSI	PNS	PPB
1	MALUKU	60	36
2	MALUKU UTARA	59	17
3	PAPUA	71	21
4	PAPUA BARAT	58	12
	TOTAL	**248**	**85**

*Sumber: Seksi Penyuluhan BPPP Ambon * Data s.d. Juni 2021*

Selain Penyuluh Perikanan PNS, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP juga merekrut 34 Orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan 85 orang berada diwilayah Satminkal BPPP Ambon, dimana Penyuluh Perikanan Bantu ini ikut berperan dalam penyelenggaraan penyuluh kepada sasaran penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Tugas Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai dengan peranannya adalah sebagaimana berikut:

1. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan;
2. Mendampingi kelompok perikanan di wilayah binaan yang ditetapkan;
3. Menumbuhkan kelompok perikanan di wilayah binaan yang ditetapkan;
4. Menilai Kelas Kelompok kelautan dan perikanan di wilayah binaan yang ditetapkan;
5. Meningkatkan kelas kelompok perikanan;
6. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha Mikro Kecil Sektor KP;
7. Melakukan pembinaan koperasi sektor KP;
8. Memfasilitasi akses permodalan usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari perbankan atau non perbankan;
9. Fasilitasi pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mendapatkan bantuan akses pasar hasil perikanan;
10. Memfasilitasi akses informasi dan teknologi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
11. Mensosialisaskan peraturan terkait kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;

12. Mendampingi program prioritas kkp termasuk bantuan Pemerintah kementerian kelautan dan perikanan tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
13. Melakukan pendataan dan atau Updating data Objek KP;
14. Membuat Laporan.

3) Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari pelaku utama/usaha yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, penggiat konservasi dan masyarakat profesi lainnya. Jumlah pelaku utama/usaha kelautan perikanan saaat ini mencapai 6,5 jt orang yang 90% diantaranya berusaha dalam skala mikro dan tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat untuk RTP pengolahan dan sedikit mengalami penurunan untuk dua RTP lainnya.

(1) Nelayan

Sebagian besar nelayan bekerja di perikanan tangkap di laut dibanding dengan nelayan perairan umum. Jumlah nelayan menurut sub sektor perikanan tangkap tahun 2018 di wilayah kerja BPPP Ambon sebanyak 335.800 orang.

Tabel 7. *Jumlah Nelayan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap, 2018*

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan (Orang)
1	Sulawesi Tenggara	83.970
2	Maluku	124.914
3	Maluku Utara	16.607
4	Papua	78.568
5	Papua Barat	31.741
TOTAL		**335.800**

Sumber: Satu Data KKP 2018

(2) Pembudidaya Ikan

Pembudidaya ikan baik budidaya ikan air tawar, payau maupun laut di wilayah kerja BPPP Ambon pada tahun 2018 sebanyak 221.723 orang .

Tabel 8. *Jumlah Pembudidaya ikan, 2018*

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan (Orang)
1	Sulawesi Tenggara	130.608
2	Maluku	54.870
3	Maluku Utara	6.020
4	Papua	15.678
5	Papua Barat	14.547
TOTAL		**221.723**

Sumber: Satu Data KKP 2018

(3) Pengolah Hasil Perikanan

Tenaga kerja bidang pengolah dibagi menjadi tenaga kerja pengolah dan tenaga kerja pemasaran. Perkembangnya pada tahun 2018 sebanyak 1.422 orang.

Tabel 9. *Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, tahun 2018*

No.	Provinsi	Jumlah Pengolah/Pemasaran (Orang)
1	Sulawesi Tenggara	352
2	Maluku	503
3	Maluku Utara	234
4	Papua	141
5	Papua Barat	192
TOTAL		**1.422**

Sumber: BPPP – Ambon, 2018

(4) Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha

Kegiatan penyuluhan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku utama, pelaku usaha dan keluarganya. Dengan demikian karakteristik dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha menjadi faktor yang harus diperhatikan. Sasaran kegiatan penyuluhan lebih kepada kelompok pelaku utama/usaha bukan individu. Kelembagaan kelompok pelaku utama di sektor perikanan yang ada saat ini sangat bervariasi baik dari kemampuan kelas kelompok maupun dari jenis komoditas yang diusahakan. Sebagian besar kelompok pelaku utama tidak hanya melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan, umumnya mereka juga melaksanakan kegiatan usaha diluar sektor perikanan seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan lainnya.

4) Kurikulum, Modul dan Diklat Internasional

Kurikulum dan modul yang sudah dibuat berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah kurikulum dan modul pelatihan teknis bagi non aparatur. Sarana dan Prasarana Pelatihan antara lain Sarana *Basic Safety Training (BST)* .

Penyelenggaraan pelatihan yang bertaraf internasional, sesuai konvensi STCW-F (International Convention on Standards of Training, Sertification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) 1995 yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO) mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan bagi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, mencakup pelatihan terkait:

- Diklat Keselamatan Dasar (*Basic Safety Training*);
- Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN)

5) Kerjasama

BPPP Ambon senantiasa berupaya membangun jaringan kerja sama yang luas dengan seluruh pihak terkait dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan. Kegiatan fasilitasi kerja sama pelatihan yang telah dijajagi meliputi: kerjasama antara Pusat Pelatihan KP dengan Pemerintah daerah, kementerian, dunia industri dan institusi lain di dalam maupun di luar negeri.

Pelatihan-pelatihan yang dijadikan sebagai konstribusi KKP didunia internasional, seperti : *International Training on Fisheries for African and Middle East Countries* bagi 13 negara Afrika dan Timur Tengah, yaitu Senegal, Aljazair, Anggola, Djibouti, Sudan, Kenya, Nigeria, Mesir, Mozambik, Madagaskar, Namibia, Mauritania dan Zimbabwe.

6) Sasaran pelatihan KP

Program pelatihan KP diwilayah kerja BPPP Ambon dalam periode waktu 2017-2019, telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi dukungan kegiatan pelatihan terhadap program prioritas seperti peningkatan kompetensi, Kegiatan mendukung pencapaian Indkator Kinerja Utama (IKU) KKP, program Bantuan Pemerintah, Program SKPT, Program Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan program prioritas lainnya.

Gambar 4. Sasaran Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan

7) Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)

Lembaga pelatihan/permagangan di bidang kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama maju di bidang kelautan dan perikanan baik perorangan maupun kelompok. P2MKP merupakan wujud partisipasi dan keswadayaan masyarakat ikut mengembangkan SDM melalui pelatihan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jumlah P2MKP yang berada diwilayah kerja BPPP Ambon berdasarkan SK Kepala BRSDM KP Nomor 135/KEP-BRSDM/2018 sebanyak 5 (lima) lembaga antara lain :

1. P2MKP Wolio Sanck bidang Pengolahan hasil perikanan di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara
2. P2MKP Marine Center Saro bidang pembenihan ikan air laut di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara
3. P2MKP Nacha bidang Pengolahan hasil perikanan di Kota Ambon Provinsi Maluku
4. P2MKP Sweet Hatukau bidang kerajinan kerang di Kota Ambon Provinsi Maluku
5. P2MKP Sumber Rezeki bidang kerajinan kerang di Kota Ambon Provinsi Maluku

8) Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan

Peran BRSDM KP melalui penyuluhan, sebagaimana diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, status kepegawaian penyuluh perikanan sudah dialihkan dari daerah ke pusat. Kondisi ini menjadi energi baru bagi KKP dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, institusi non pemerintah, dan stakeholder lainnya. Peran penyuluh sebagai *center of excellence, agent of change* (agen perubahan) dan *agent of empowerment* (agen pemberdayaan) mendukung pencapaian tujuan program KKP. Penyuluh harus mampu memberikan pelayanan pada masyarakat, termasuk termasuk melakukan transformasi budaya sebagai salah satu pilar poros maritim. Penyuluh juga memiliki tugas untuk menyampaikan hasil riset dan pelatihan kepada pelaku utama, mampu memerangi kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*, degradasi lingkungan pesisir dan laut, meningkatkan produktivitas perikanan, memperluas akses permodalan, serta meningkatkan kualitas SDM pelaku utama perikanan.

Peran penyuluh yang telah dilakukan pada periode 2015 – 2019 diantaranya:

- Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
- Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
- Pendampingan Bantuan Pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, *ice flake*, dll.);
- Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
- Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
- Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;

- Pendampingan dan Penyuluhan di 12 SKPT;
- Pendataan Pelaku Usaha KP (KUSUKA) dan *sampling* produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
- Pengusulan dan Pemanfaatan Bale Kusuka sebagai sarana informasi pembangunan KP dan penyuluhan pelaku utama.

Bentuk kelembagaan penyuluhan perikanan meliputi:

✓ Tingkat pusat

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang menangani penyuluhan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

✓ Tingkat regional

Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua;

Satuan administrasi pangkal untuk kepegawaian penyuluh perikanan, akan berada di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon, sementara Penyuluh Perikanan tetap berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan atau Dinas yang menangani perikanan di Kabupaten/Kota.

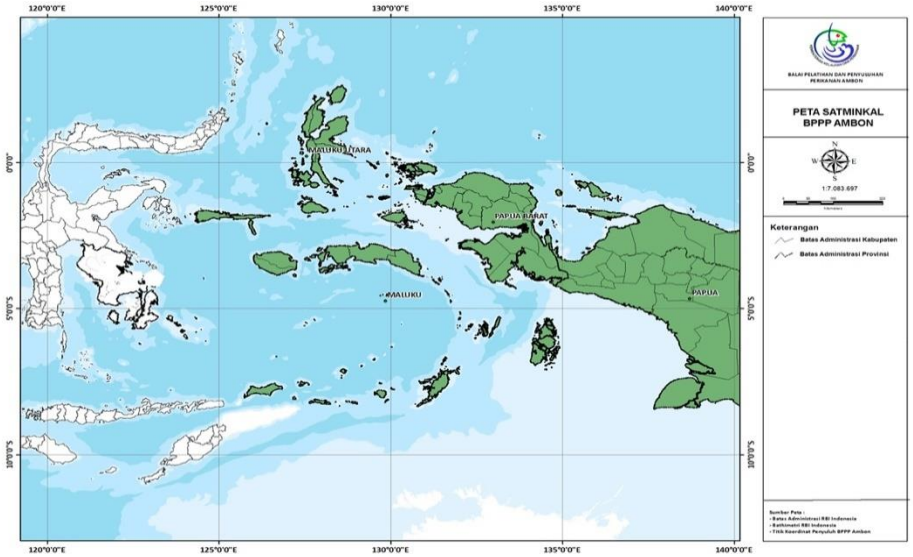

Gambar 5. Wilayah Kerja (Wilker) Satminkal BPPP Ambon

3. Potensi

Keberadaan SDM KP khususnya diwilayah timur Indonesia yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi BPPP Ambon, 5 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 5 widyaiswara dan 14 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi/BNSP dengan menggunakan standar SKKNI, KKNI dan SKK.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2020 terdapat 342 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 87 orang Penyuluh Perikanan bantu, 255 orang penyuluh PNS, tersebar di wilayah kerja Satminkal BPPP Ambon. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat.

Implementasi program digitalisasi pelatihan dan penyuluhan KP yang siap operasional tahun 2020 yaitu online training untuk pelatihan dan E-Penyuluh untuk kegiatan penyuluhan KP. Kedua aplikasi tersebut dirancang bangun kerjasama Puslatluh KP dengan Pusdatin dengan pembiayaan rancang bangun software oleh Pusdatin Setjen KKP. Aplikasi Online Training bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan yang menjangkau kawasan yang luas, biaya

murah, terakreditasi, tidak terkendala waktu, cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu, dalam rangka mengembangkan Sistem Kerja Smart Office bagi Aparatur Sipil Negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan terpilih menjadi salah satu pusat percontohan role model ASN berkerja secara mobile dari rumah. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. Setiap kinerjanya akan dipotret melalui sistem E-Penyuluh. Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan. Beberapa informasi terkait E-Penyuluh sebagai berikut:

a. Aplikasi E-Penyuluh merupakan adalah alat bantu dalam bentuk aplikasi berbasis web dan mobile bagi Penyuluh Perikanan dengan subtansi pokok pelaporan aktivitas dan kinerja Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok Penyuluhan dan pendampingan pada pelaku utama KP (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam) dan pelaku usaha KP di tingkat lapangan.
b. Manfaat E-Penyuluh antara lain:
    1) Hasil kegiatan diinput langsung dalam modul e-penyuluh yang telah dipasang di handphone;
    2) Modul e-penyuluh dapat dibuka dan diinput secara off-line tidak tergantung jaringan internet;
    3) Laporan kegiatan dan capaian target (kinerja) dibuat otomatis dalam format standar yang telah ditentukan dengan konten informasi diambil dari data yang telah diinput;
    4) Modul e-penyuluh terintegrasi dengan modul KUSUKA dan Pendataan Produksi, Kegiatan pendataan dapat dilakukan pada perangkat handphone yang sama;
    5) Kehadiran tercatat sesuai waktu masuk saat mengisi informasi kegiatan dan waktu keluar saat selesai melakukan kegiatan.

4. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Ambon dalam mengembangkan SDM guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan, dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) aspek, yaitu:

Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:

a. Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
b. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yanag dilaksanakan di P2MKP (safari), mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
c. Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP seperti di Wilayah Perbatasan, SKPT dan lainnya;
d. Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
e. Belum ada model pelatihan berbasis daring yang mudah diakses baik nasional maupun International;
f. Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
g. Rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP disetiap wilayahnya;
h. Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;

i. Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dibidang kelautan dan perikanan

j. Standard kompetensi masih terbatas jumlahnya;

k. Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;

l. Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatkan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan;

m. Aspek pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya:

n. Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;

o. Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;

p. Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;

q. Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer;

r. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah;

s. Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasi.

t. Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

u. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;

v. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;

w. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;

x. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;

y. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;

z. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

1. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
2. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
3. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai ;
4. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
5. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
6. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
7. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
8. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaran penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

D. Lingkungan Strategis

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, serta evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan, tugas tersebut dilakukan dengan melakukan fungsi-fungsi: Penyiapan penyusunan bahan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan; Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan

penyuluhan kelautan dan perikanan; Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPPP Ambon. Selain itu, juga tetap memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pelatihan dan penyuluhan dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

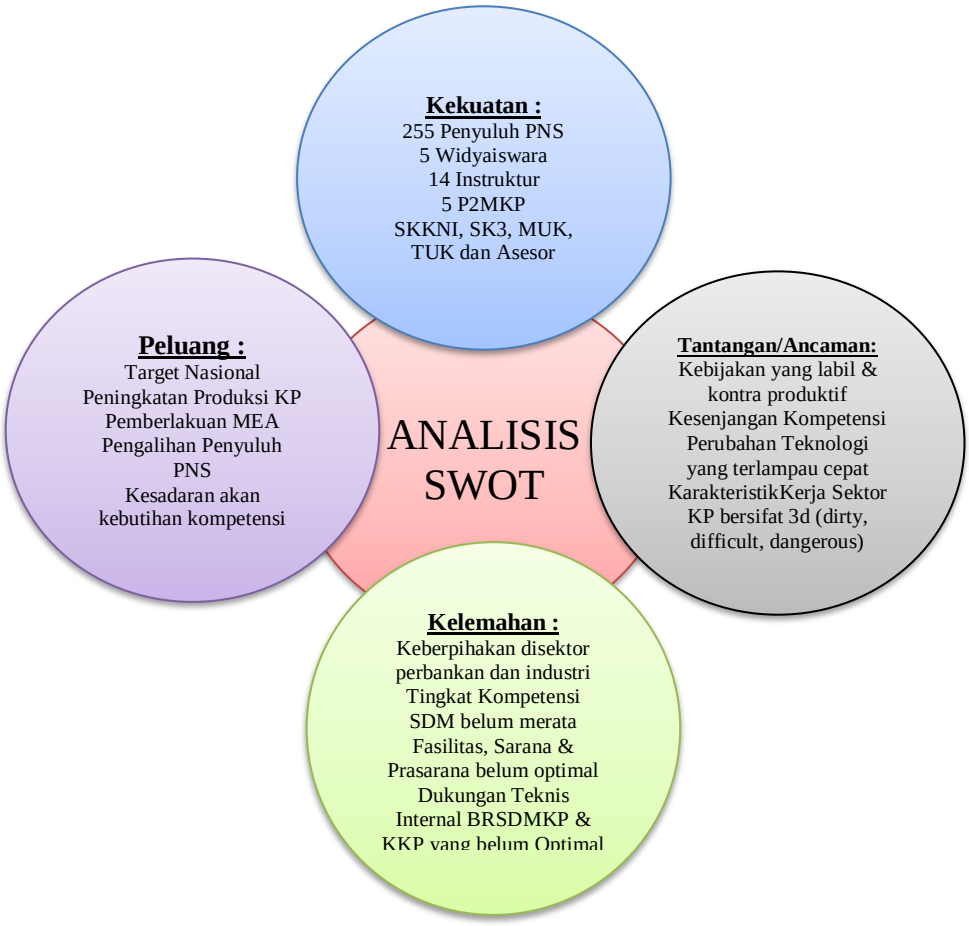

Gambar 6. Ilustrasi analisis SWOT kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP

Secara teoritis, lingkungan strategis ini dapat diartikan sebagai situasi faktor yang strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BPPP Ambon. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi faktor yang strategis tersebut adalah faktor-faktor strategis yang bersumber dari internal (*Internal Factor Strategic*) maupun eksternal (*External Factor Strategic*) baik yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah baik di tingkat global, regional, nasional maupun sektoral. Faktor-faktor strategis internal tersebut meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknes*), sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Situasi internal dan eksternal dalam lingkungan strategis yang dihadapi BRSDM KP meliputi:

1. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal

a. Tingkat Global

1) Adanya persyaratan kompetensi untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan sehingga mampu bersaing sesuai *guidelines for development of Regional Model Competensy Standards (RMCS) ILO*;
2) Adanya pemenuhan persyaratan tentang kapasitas kelembagaan dan SDM bidang penangkapan ikan yang mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga awak kapal sesuai dengan konvensi yang dikeluarkan oleh IMO (*STCW-F 1995*);
3) Perkembangan era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah memicu digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor dalam proses industri serta menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik;
4) Kompetensi pada bidang teknologi informasi yang harus dimiliki SDM KP untuk menghadapi persaingan di era globalisasi dan ekonomi digital;

b. Tingkat Regional

1) Implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat regional (APEC, MEA, dan WTO) maupun antar negara yang bersifat

bilateral, membutuhkan penyiapan riset dan SDM yang unggul;

2) Penetapan standar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan *ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognation of Competency Certification System;*
3) Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan konsumsi ikan;
4) Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan BRSDM KP.

c. Faktor Strategis Lingkungan Internal di Tingkat Nasional

1) Konektivitas antar pulau;
2) Potensi sumber daya KP yang melimpah dimanfaatkan secara optimal karena 90% pemanfaat didominasi skala kecil baik di laut maupun perairan umum daratan;
3) Produk perikanan primer yang memiliki nilai tambah rendah masih mendominasi struktur perekonomian sektor KP;
4) Tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat KP masih rendah.

E. Isu Strategis

Dalam merespon sejumlah isu yang berkembang disektor kelautan dan perikanan, keberadaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berperan sangat penting. Beberapa isu strategis yang memerlukan kontribusi dari hasil pelatihan dan penyuluhan dikaitkan dengan program nasional dan kementerian, diantaranya adalah:

a. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi di pulau terdepan, dengan sasaran untuk : (a) meningkatkan ekonomi rumah tangga kelautan dan perikanan, (b) menambah usaha kelautan dan perikanan menengah ke atas menjadi berdaya saing, dan (c) menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional.

b. Pengembangan *enterprenuership* menuju *technopreneurship*, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan iptek untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dengan didukung oleh tata kelola yang baik (*good governance*). Para pelaku usaha KP perlu difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, akses terhadap permodalan, pemasaran hasil dan akses terhadap teknologi serta informasi, termasuk peningkatan kemampuan dalam menjalankan *co-management* pengelolaan sumberdaya KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan;

c. Peningkatan keterampilan dan kompetensi dibidang teknik budidaya ikan (akuakultur), penangkapan, pengolahan produk dan peningkatan nilai tambah, keamanan pangan, konservasi melalui pengenalan alat tangkap ramah lingkungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim, termasuk didalamnya memperkenalkan mata pencaharian alternatif.

d. Dalam bidang ekonomi dan industri, pada tahun 2016 Indonesia memasuki era *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai konsekuensi dari berlakunya kesepakatan internasional. Beberapa persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam rangka menghadapi MEA, yaitu: 1) masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); 2) rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja; 3) pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah; 4) meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 5) ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi; 6) sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah; 7) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN; ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA; 8) tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta 9) masalah Tenaga Kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri.

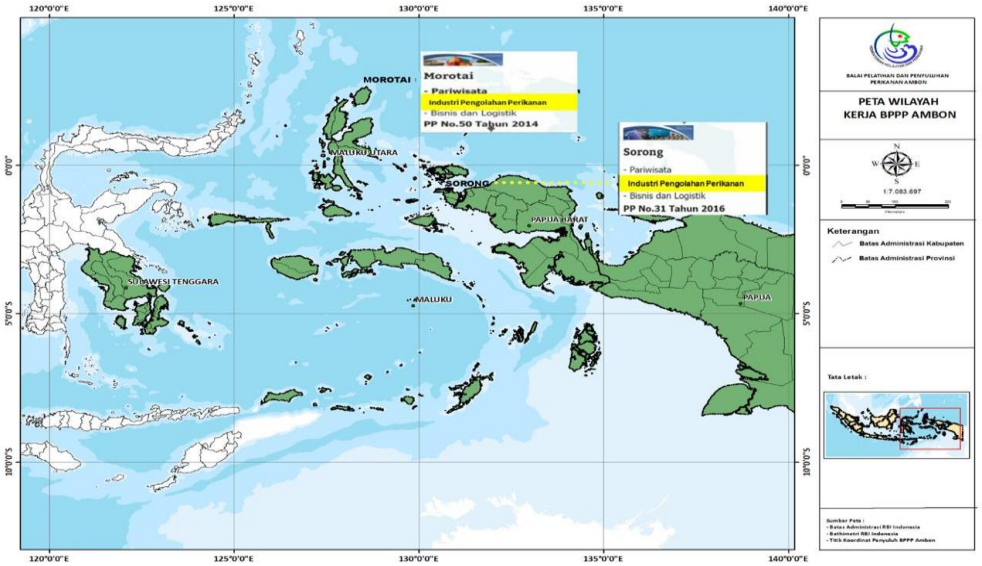

Gambar 7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wilayah kerja BPPP Ambon yang membutuhkan peranan pelatihan dan penyuluhan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP, visi BRSDM dan visi Puslatluh KP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

1.2 Misi

Misi BPPP Ambon adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Puslatluh KP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

1.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BRSDMKP. Untuk itu tujuan pelatihan dan penyuluhan KP adalah menghasilkan SDMKP mandiri dan kompeten yang dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri serta mampu menjadi wirausaha dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan secara optimal serta sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya KP, dengan indikator tujuan adalah:

1) Tersedianya lembaga pelatihan dan penyuluhan KP sesuai dengan standard;
2) Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sesuai standard;
3) Tersedianya tenaga pelatihan dan kepelatihan yang profesional;

4) Peserta latih yang kompeten;
5) Jumlah kelompok pelaku utama yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya;
6) Penyuluh perikanan yang kompeten dan berdaya saing.

1.4 Sasaran Strategis BPPP Ambon 2020 - 2024

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 - 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Ambon dalam mendukung target kinerja sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan

SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab

SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing

SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif

SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai BRSDM pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SS1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

SS2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS4 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan

SS5 Tatakelola pemerintahan yang baik

Selanjutnya Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BRSDMKP adalah sebagai berikut :

SS1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

SS2 Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS4 Tatakelola pemerintahan yang baik

Maka BPPP Ambon, dengan memperhatikan misi KKP, tujuan BRSDMKP dan sasaran strategis Puslatluh KP tahun 2020-2024, sasaran strategis yang akan dicapai BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP, BRSDMKP dan Puslatluh KP adalah sebagai berikut :

SS1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

SS2 Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS4 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dalam penyusunannya, BPPP Ambon menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective, Customer perspective, Internal Process perspective,* dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah "Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja:

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. SS ini diturunkan ke BRSDM dan Puslatluh KP menjadi "Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP" dengan IKU yaitu "Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon, Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon dan Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjdai kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon. Ketiga IKU ini menjadi tanggungjawab Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Costumer Perspective

Sasaran strategis ke-dua (SS-2) yang akan dicapai adalah Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan, dengan indikator kinerja:

Desa mitra yang menerapkan Iptek KP, di BRSDM target IKU desa mitra yang menerapkan IPTEK KP tahun 2020-2024 adalah sebanyak 54 desa, dari 54 desa, PuslatluhKP berkontribusi 5 desa setiap tahunnya, atau selama tahun 2020-2024 sebanyak 25 desa mitra sehingga BPPP Ambon berkontribusi 1 desa setiap tahunnya.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis ke-tiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat, dengan indikator kinerja:

1) Jumlah lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri.
2) Jumlah lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)
3) SDM KP yang dilatih.
4) Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi.

5) Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan.
6) Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya .
7) Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat.
8) Usaha mikro kecil dan koperasi sektor KP yang dibina di BPPP Ambon.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPPP Ambon melalui Sasaran strategis ke empat (SS-4) "Tatakelola pemerintahan yang baik" dengan indikator kinerja :

- Indeks Profesionalisme ASN dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024.
- Unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82 %.
- Nilai Kinerja Anggaran Puslatluh KP dari Baik pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik pada tahun 2024
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebedar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024,

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengem- bangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai stategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain tekait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yeng meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
    a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan *database* kelautan dan perikanan
    b. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif,
    c. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
    d. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;
    e. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;
    f. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi
    g. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
    h. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan

i. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;

j. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan Penagrusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Gender
3. Modal Sosial Budaya
4. Transformasi Digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunansektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water yang mencakup diantaranya (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation n on the Law of the Sea (UNCLOS).

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

3.3 Arah Kebijakan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon

Kebijakan yang dilaksanakan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam mendukung peran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan dan BRSDM dalam pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu:

A. Pelatihan KP

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat yang ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi masyarakat KP agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan taraf kehidupannya. Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain :

a. Mengembangan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
b. Melakukan akreditasi program dan lembaga pelatihan KP;
c. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;
d. Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
e. Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis digital talent untuk menghasilkan startup di bidang kelautan dan perikanan;
f. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online trainning*).

Tahun 2024 ditargetkan Pelatihan berstandar SKKNI & Internasional dengan langkah langkah seperti menyusun kurikulum dan modul standar nasional dan internasional guna memenuhi Persyaratan kompetensi tenaga kerja global. Selain itu di tahun 2024 juga BPPP Ambon akan ditargetkan sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

BPPP Ambon akan diinisiasi menjadi *training centre* yang spesifik seperti training centre penangkapan ikan dan *training centre* budidaya perikanan laut. Selanjutnya akan dibuat pola *container* standar berisi peralatan lengkap untuk melayani kebutuhan pelatihan-pelatihan teknis di sentra-sentra masyarakat, sebagai *mobile training center* melibatkan alumni satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai pelatih/instruktur. *Mobile training center* dapat berisi pelatihan penangkapan, permesinan, pengolahan dan budidaya.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis kompetensi, (b) Sertifikasi dan akreditasi pelatihan (c) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur). Kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam mendukung program kementerian diataranya adalah pelatihan pada masyarakat pelaku utama dan usaha.

Pelatihan dimaksudkan untuk Pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang dan mempunyai arah untuk: (a) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi mayarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (c) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional sektor KP, antara lain:

a. Menyusun rencana aksi dan tindak lanjut Permen KP tentang Lobster, memerlukan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan budidaya lobster;
b. Dukungan pelatihan terhadap strategi peningkatan produksi budidaya udang, dengan menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan budidaya udang, pelatihan pembuatan pakan, dan membangun sdm budidaya udang;
c. Strategi pencegahan dan penyebaran sampah plastik, pelatihan penanganan dan pengelolaan sampah plastik;

d. Membuat prototipe miniplant solar refrigeraton, yaitu membuat pabrik es sederhana (berfungsi sebagai cold storage dan ice flake machine) dengan sumber energi tenaga surya untuk diintegrasikan sebagai sarana pengawetan produk perikanan disentra-sentra pemasaran ikan;

e. Pelatihan kepada pelaku utama penerima bantuan pemerintah dari eselon I teknis, sebagai upaya untuk mengefektifkan bantuan bantuan yang telah diterima oleh masyarakat;

f. Pelatihan lainnya nanti yang dibutuhkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional yang ada di sektor kelautan dan perikanan;

B. Penyuluhan KP

Kegiatan penyuluhan berdasarkan kepada metoda dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui :

1) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
2) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
3) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan
4) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

a. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;
   - Peningkatan kelas kelompok mandiri
   - Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah
   - Penempatan dan penyebaran penyuluh di seketariat penyuluhan di kab/kota

- Membuat piramida model penyuluh (PNS, PPB dan Penyuluh Swadaya)

b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
   - Peningkatan daya saing penyuluh PNS
   - Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB)
   - Pembinaan Penyuluh Perikanan swadaya

c. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital;
   - Pengembangan materi *cyber extention*
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi
   - Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)
   - Membangun Sistem Penyuluhan Digital, yang memuat sistem absensi, sistem pelaporan kinerja, dan sistem konsultasi/ pendampingan
   - Membangun sistem penilaian kinerja penyuluh PNS, P3K & Swadaya berbasis lokasi (gps)
   - Membangun standar *digital library,* dengan memuat modul-modul yang lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi *Pool knowledge*

d. Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
   - Penataan sarana dan prasarana penyuluhan
   - Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan
   - Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan
   - Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja
   - Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh
   - Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun **4 (empat) sasaran pokok** dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

1) **Sasaran Pertama** Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan

diletakkan pada: (1) Perencanaan partisipatif; (2) Pelatihan dan pendampingan; (3) Tahap peningkatan skala usaha kelompok menuju UMKM KP unggulan (4) Tahap penumbuhan kelompok usaha mandiri; (5) Tahap pemantapan kelompok; (6) Tahap pengembangan kelompok; dan (7) Kegiatan pendampingan kelompok atau gabungan kelompok pada tahap pra-produksi, produksi, dan diversifikasi produk.

2) **Sasaran Kedua** Peningkatan Penguasaan Manajemen Usaha, Teknologi dan penjaminan mutu produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Penguasaan kelompok masyarakat mitra terhadap manajemen usaha; (2) Pengusaaan masyarakat mitra terhadap teknologi produksi; (3) Peningkatan mutu dan nilai tambah; (4) Segmentasi pasar dan preferensi konsumen; dan (5) Pengawasan mutu produk.

3) **Sasaran Ketiga** Pengembangan Permodalan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Mobilisasi dana bersama dalam kelompok; (2) Bimbingan pengelolaan dana bersama; dan (3) Bimbingan pengenalan sumber-sumber permodalan.

4) **Sasaran Keempat** Pengenalan dan Perluasan Pasar. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengenalan kelompok atau gabungan kelompok kepada akses pasar lokal; (2) Pengenalan pada pasar regional maupun internasional; dan (3) Pengenalan kelompok pada diversifikasi produk.

C. Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan SDM KP

Kerjasama program pelatihan dan penyuluhan KP bertujuan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dengan *stakeholder*. Kerjasama dilakukan dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, NGO atau LSM, Dunia Usaha/industri, lembaga dalam dan luar negeri, individu yang mempunyai korelasi dengan pelatihan dan penyuluhan serta *stakeholder* lainnya.

Kerjasama penyelenggaraan pelatihan diarahkan pada *Open Resources* dengan membangun Sistem Pelatihan dengan melibatkan dunia usaha dan industri (*hightech recomanded*).

Agenda kerjasama pelatihan dan penyuluhan dalam mengembangkan sistem pelatihan KP, sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Sasaran Pertama

Terpenuhinya modal usaha kelompok yang digali dari anggota kelompok itu sendiri, donatur perorangan, pemerintah daerah, lembaga donor dalam dan luar negeri, lembaga keuangan maupun perusahaan dalam rangka pemanfaatan dana tanggungjawab sosial masyarakat (CSR). Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Membuat kriteria seleksi calon anggota kelompok; (2) Sosialisasi paket-paket pelatihan unggulan dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku utama/ dan atau pelaku usaha; (3) Menjual paket pelatihan sertifikasi dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap pakai; (4) Sosialisasi paket pelatihan dalam rangka mendukung isu pemanasan global dan degradasi ekosistem pesisir; dan (5) Melakukan kerjasama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan lembaga penempatan kerja.

b. Sasaran Kedua

Terpenuhinya sarana pelatihan dan penyuluhan dari sumber-sumber pembiayaan seperti tersebut pada sasaran pertama. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama yang komplementer dan saling menguntungkan dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan tertentu yang bersumber dari pemerintah daerah maupun sumber-sumber lain dalam negeri; dan (2) Mencari dana hibah luar negeri dari lembaga donor negara sahabat dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan terkini.

c. Sasaran Ketiga

Peningkatan kapasitas SDM-KP melalui pembiayaan yang bersumber dari non APBN KKP. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama antara lembaga pelatihan dengan berbagai

lembaga donor di luar negeri dalam rangka hibah pelatihan maupun penyuluhan; dan (2) Kerjasama antar lembaga pelatihan dan penyuluhan di luar sektor perikanan dalam rangka peningkatan kompetensi antar pengelola pelatihan dan penyuluhan kedua belah pihak.

3.4 Strategi Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha mendukung masyarakat KP meningkat kesejahteraannya

Strategi 1: Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM serta program eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah

Langkah Operasional:

1. Penguatan kelembagaan pelaku usaha/masyarakat kelautan dan perikanan (penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok)
2. Menyiapkan Programa Penyuluhan Perikanan yang partisipatif, kolaboratif dan integral
3. Mendiseminasikan inovasi hasil riset teknologi kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
4. Mengembangkan sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis online
5. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan berbasis kebutuhan inovasi teknologi adaptif kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Mengidentifikasi dan memetakan teknologi kelautan dan perikanan yang dibutuhkan pelaku utama kelautan dan perikanan
7. Menyiapkan NSPK Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

8. Menyusun materi penyuluhan berbasis hasil riset inovatif
9. Melakukan penguatan sarana prasarana penyuluhan
10. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan melalui Pos Penyuluhan
11. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha
12. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan KP.
13. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama KP.
14. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (*cyber extension*); dan Temu: aplikasi, percontohan, dll.

Sasaran Strategis 2 : Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

Strategi 1: Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan

Langkah Operasional:

1. Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan industrialisasi KP.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dan diseminasi teknologi yang direkomendasikan dan inovasi teknologi adaptif lokasi.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil kajian kebijakan (*policy brief*) dalam merespon isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang sedang dan potensial berkembang.
4. Membuat percontohan percontohan penyuluhan di lokasi binaan penyuluhan yang menerapkan teknologi inovasi hasil riset.
5. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendiseminasi hasil riset yang disesuaikan dengan teknologi adaptif lokasi.

Strategi 2: Mendukung diseminasi hasil riset selaras dengan pengembangan industri kelautan dan perikanan

Langkah operasional:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan riset yang spesifik lokasi;
2. Menjalin kerja sama dengan lembaga riset dalam pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan yang saling menguatkan;
3. Membuat publikasi hasil riset dengan menggunakan bahasa penyuluhan yang lebih mudah dipahami dan menyeseuaikan dengan kebutuhan pelaku utama/pelaku usaha.

Sasaran Strategis 3 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

Strategi 1: Membangun sistem penyelenggaraan pelatihan berbasis kerjasama industri

Langkah operasional:

1. Menghasilkan lulusan pelatihan yang membentuk startup/wirausaha baru.
2. Melaksanakan perencanaan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan;
3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
4. Mengembangkan Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat;
5. Mengembangkan modul, kurikulum pelatihan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pelatih sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
7. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan diklat.
8. Meningkatkan dan mengembangkan jenis dan metode pelatihan berbasis kinerja/kompetensi;

Strategi 2 : Ikut serta dalam membangun sistem pelatihan ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kapasitas aparatur sebagai motivator dan dinamisator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) **Sasaran Pertama:** Pemenuhan kompetensi administrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi bidang administrasi, antara lain:
   a) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen perkantoran;
   b) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen keuangan;
   c) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen SDM;
   d) Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen mutu;
   e) Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen lingkungan;
   f) Penumbuhan jiwa kewirausahaan instansi pemerintah; dan
   g) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen publik.

2) **Sasaran Kedua:** Pemenuhan kompetensi teknis substansi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada:
   a) Pengembangan kompetensi bidang penangkapan ikan;
   b) Pengembangan kompetensi bidang pembudidayaan ikan;
   c) Pengembangan kompetensi bidang pengolahan ikan;
   d) Pengembangan kompetensi bidang konservasi sumberdaya ikan;
   e) Pengembangan kompetensi bidang pengawasan perikanan;
   f) Pengembangan kompetensi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
   g) Pengembangan kompetensi bidang permesinan perikanan.

3) **Sasaran Ketiga:** Pemenuhan kompetensi fungsional. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: a) Penyuluh Perikanan; b) Arsiparis; c) Widyaiswara dan d) Instruktur/.

Dengan Langkah Operasional:

1. Meningkatkan kapasitas ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi

2. Mengembangkan modul, kurikulum diklat untuk memenuhi kebutuhan diklat jabfung/teknis 20 JP setiap pegawai per tahun.
3. Menyusun Roadmap ASN BPPP Ambon
4. Menyusun Pola Karir dan Formasi ASN BPPP Ambon
5. Menyusun Peta Jabatan ASN BPPP Ambon
6. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) BPPP Ambon

Strategi 3: Membangun sistem pelatihan dan penyuluhan KP berbasis digital/Teknologi Informasi

Langkah Operasional:

1. Mengembangkan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh *e-leaning*, online training dan skema *blended training* (gabungan online training dan klasikal).
2. Menyusun NSPK pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital.
3. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pelatihan dan penyuluhan KP digital.
4. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi
5. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital (*e-learning, dan e-trainning*)

Sasaran Strategis 4 : . Tatakelola pemerintahan yang baik

Strategi : Membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan BPPP Ambon

Langkah Operasional :

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan,
2. Meningkatakan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju Satker berstatus WBK/WBBM.
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel

4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparant, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasan terkait dengan strategi BPPP Ambon dalam mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat dijabarkan sebagaimana gambar 8. Dengan Sumberdaya yang ada, baik itu SDM yang terdiri dari pegawai pusat, widyaiswara, instruktur, pengelola pelatihan, penyuluh perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu, serta kelembagaan pusat dan UPT yang melaksanakan fungsi pelatihan dan penyuluhan serta didukung dengan anggaran yang ada, merupakan modal awal untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pada prosesnya yang menjadi prioritas adalah pelatihan aparatur dan non aparatur, peningkatan keterampilan masyarakat KP, penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok serta pembentukan lembaga kemandirian kelautan dan perikanan. Pada prosesnya akan dilakukan terus evaluasi dan monitoring untuk mendapatkan *feedback* dari *stakeholder* agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya.

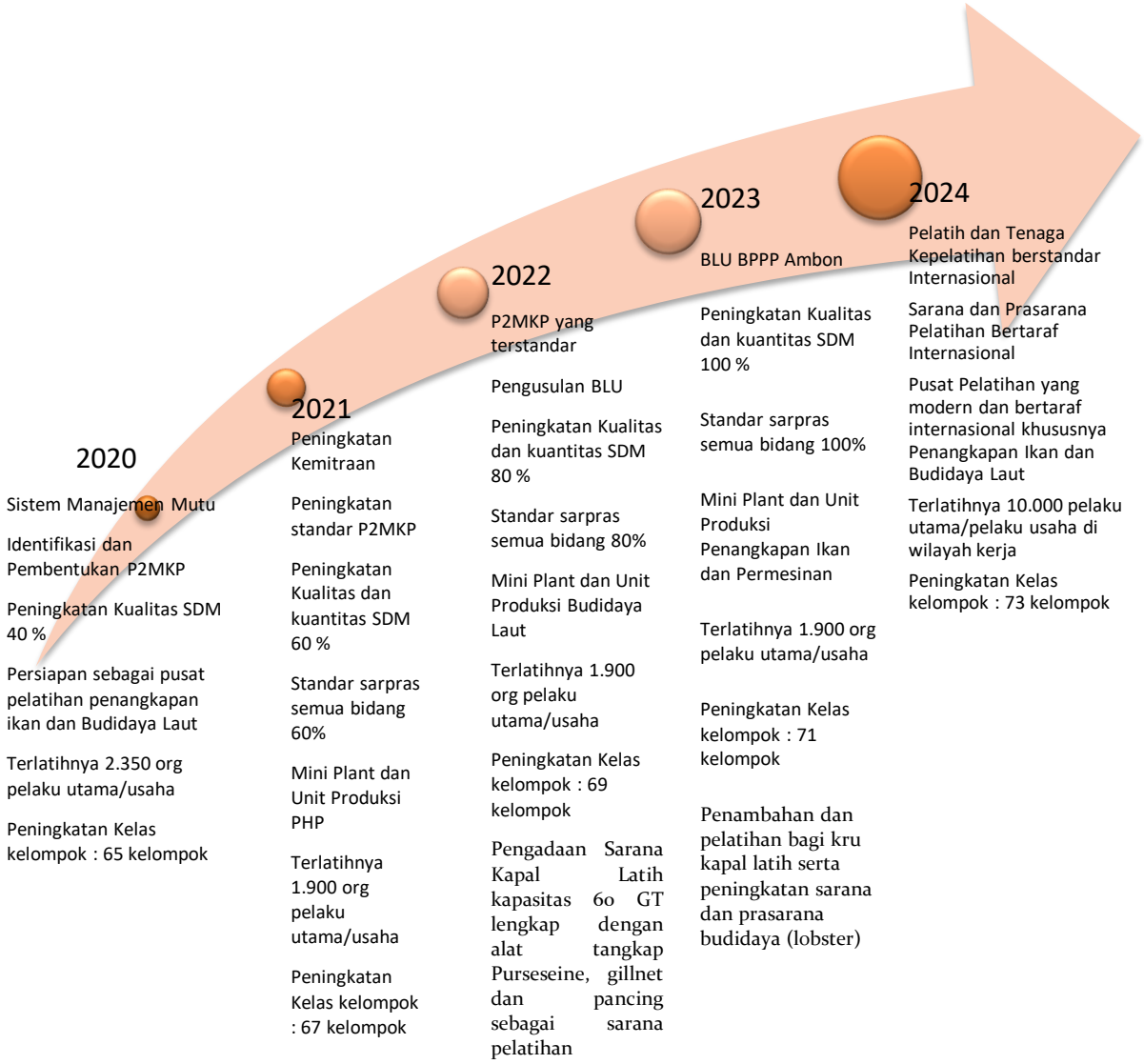

Gambar 8. Roadmap BPPP Ambon 2020-2024

Tahun 2020 fokus pada Sistem Manajemen Mutu, Identifikasi dan Pembentukan P2MKP, Peningkatan Kualitas SDM 40 %, Persiapan sebagai pusat pelatihan penangkapan ikan dan Budidaya Laut, Terlatihnya 2.350 org pelaku utama/usaha dan Peningkatan Kelas kelompok : 65 kelompok

Tahun 2021 targetnya adalah Peningkatan Kemitraan, Peningkatan standar P2MKP, Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM 60 %, Standar sarpras semua bidang 60%, pembentukan *Mini Plant* dan Unit Produksi PHP, Terlatihnya 1.900 org pelaku utama/usaha dan Peningkatan Kelas kelompok : 67 kelompok

Tahun 2022 memiliki P2MKP yang terstandar, Pengusulan BPPP Ambon menjadi Badan Layanan Umum, Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM 80 %, Standar sarpras semua bidang 80%, Pembentukan Mini Plant dan Unit Produksi Budidaya Laut, Terlatihnya 1.900 org pelaku utama/usaha, Peningkatan Kelas kelompok : 69 kelompok, Pengadaan Sarana Kapal Latih kapasitas 60 GT lengkap dengan alat tangkap Purseseine, gillnet dan pancing sebagai sarana pelatihan.

Tahun 2023 BPPP Ambon diharapkan telah menjadi BLU, Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM 100 %, Standar sarpras semua bidang 100%, Mini Plant dan Unit Produksi Penangkapan Ikan dan Permesinan, Terlatihnya 1.900 org pelaku utama/usaha, Peningkatan Kelas kelompok : 71 kelompok, Penambahan dan pelatihan bagi kru kapal latih serta peningkatan sarana dan prasarana budidaya (lobster)

Tahun 2024 diharapkan BPPP Ambon memiliki Pelatih dan Tenaga Kepelatihan berstandar Internasional, Sarana dan Prasarana Pelatihan Bertaraf Internasional, Pusat Pelatihan yang modern dan bertaraf internasional khususnya Penangkapan Ikan dan Budidaya Laut, Terlatihnya 10.000 pelaku utama/pelaku usaha di wilayah kerja dan Peningkatan Kelas kelompok : 73 kelompok

Adapun secara teknis pendetailan proses penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur pendukung dan dilaksanakan sesuai prosedur dan tahapannya. Secara garis besar penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam tiga tahapan, sebagaimana Gambar 9.

Tahap Pertama adalah Rancang Bangun Program, tahapan ini sebagai bagaian dari tahapan identifikasi kebutuhan diklat. Termasuk didalam nya adalah: Analisis jabatan, assessment untuk mengetahui tingkat kompetensi, peta kualifikasi, selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang sudah dimiliki dengan minimal kompetensi yang harus dimiliki untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Selanjutnya hasil analisis kesenjangan kompetensi tersebut menjadi dasar penyusunan program diklat yang akan diselenggarakan.

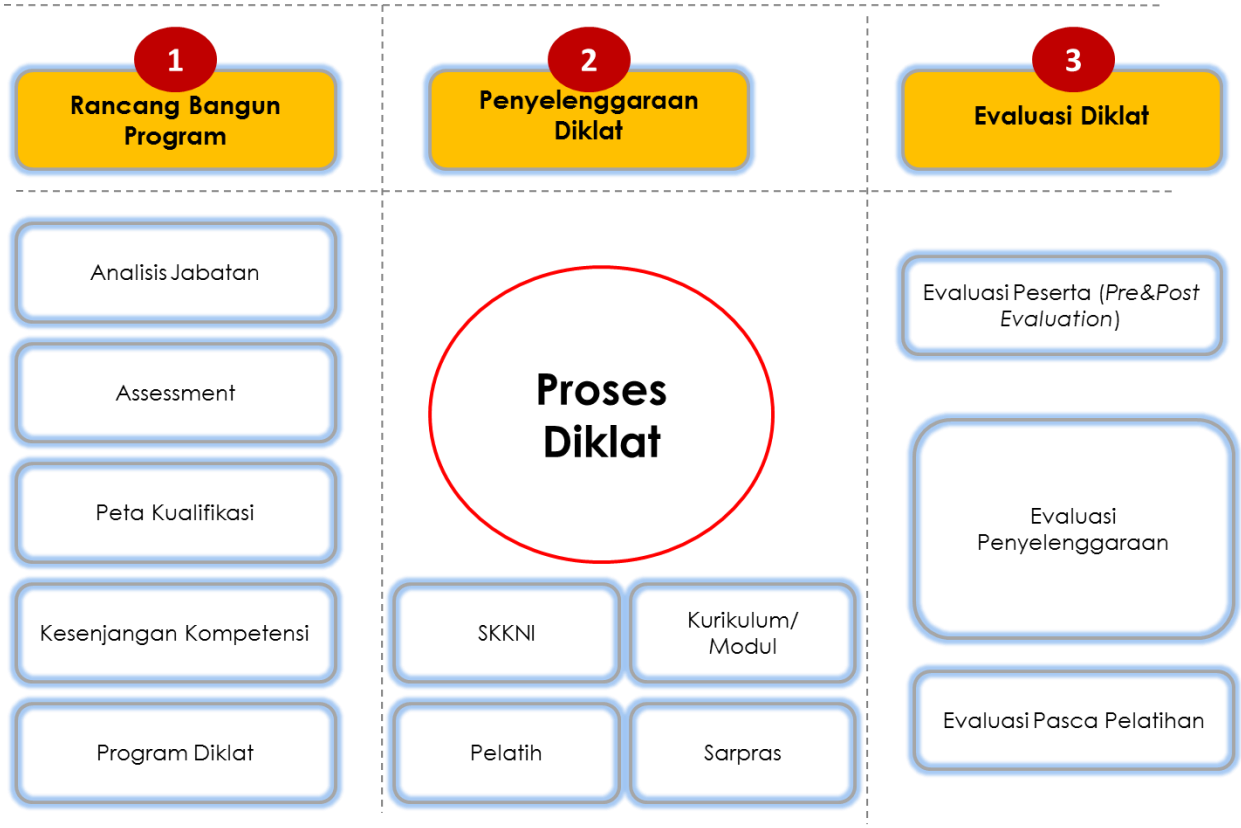

Gambar 9. Dukungan Penyelenggaraan Diklat

Tahap kedua adalah Penyelenggaraan Diklat, tahapan ini dimana tidak saja hanya tentang pelaksanaan diklat, akan tetapi juga menyangkut perangkat pendukungnya seperti SKKNI, Kurikulum dan Modul, pelatih yang terdiri atas widiyaiswara dan instruktur, serta sarana prasarana pelatihan.

Tahap ketiga adalah evaluasi diklat, evalausi menyangkut kemampuan peserta latih, *pretest* dan *post evaluation*, evaluasi penyelenggaraan diklat serta evaluasi pasca pelatihan.

Sedangkan untuk pendetailan proses penyelenggaraan penyuluhan merupakan satu kesatuan yang utuh yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagaimana Gambar 10.

Tahap Pertama, Tahap rancang bangun program yang terdiri atas pemetaan pelaku utama/usaha dan kelompoknya baik dalam hal jumlah, lokasi, identifikasi karakter sosial, budaya perorangan maupun kelompok, identifikasi jenis usaha, komoditas dan karakteristik produk yang dihasilkan, selain itu juga pemetaan penyuluh perikanan yang terdiri atas jumlah penyuluh, kompetensinya, sebarannya serta jenjang jabatannya. Selain pemetaan penyuluh dan sasaran penyuluhan, juga perlu

mempersiapkan regulasi penyuluhan KP sebagai acuan dan dasar hukum pelaksanaan penyuluhan. Kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang sudah ditarik ke pusat, tentunya harus diatur lebih lanjut operasional pelaksanaannya dan mekanisme tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

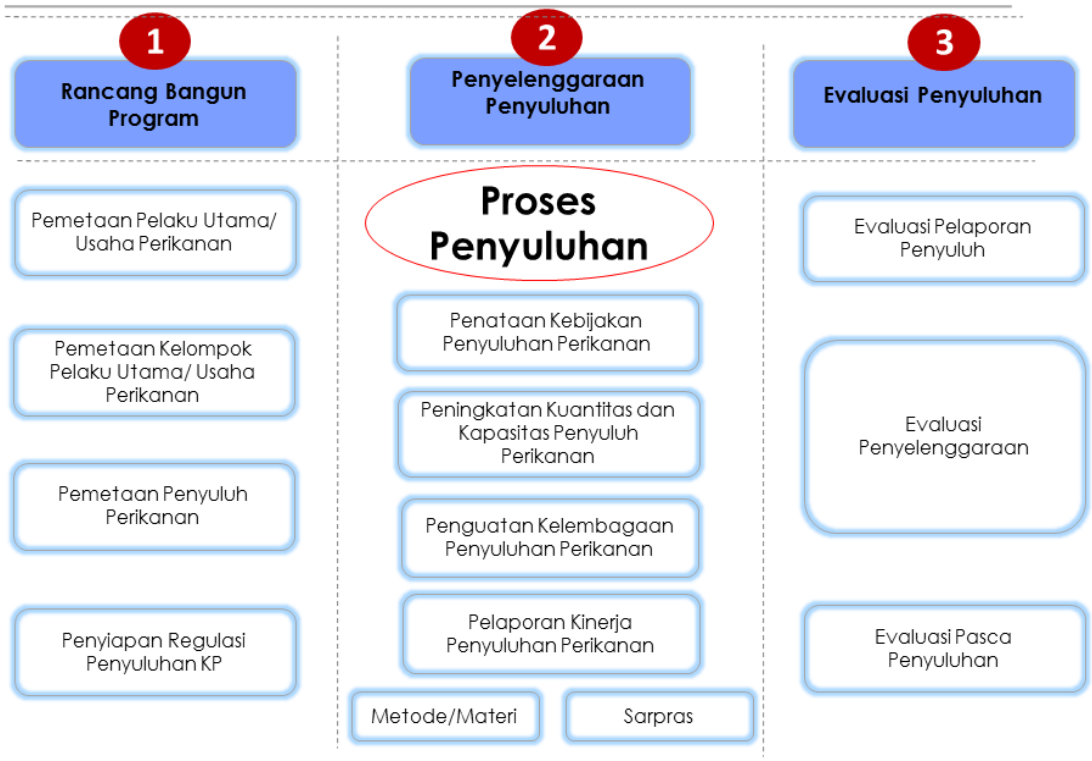

Gambar 10. Proses Penyelenggaraan Penyuluhan

Tahap Kedua adalah tahap penyelenggaraan penyuluhan. Pada tahapan ini sudah mulai dilakukan penataan kebijakan terkait penyuluhan perikanan, peningkatan kuantitas dan kapasitas penyuluh perikanan, penguatan kelembagaan penyuluhan perikanan baik kelembagaan pelaku utama maupun kelembagaan penyuluh perikanan, perancangan konsep dan format pelaporan penyuluh perikanan, metode dan materi penyuluhan yang perlu dilakukan pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan KP mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan.

Tahap Ketiga yang cukup penting adalah tahap evaluasi, baik itu evaluasi terkait pelaporan kinerja penyuluh perikanan, evaluasi penyelenggaraan penyuluhan

perikanan serta evaluasi pasca penyuluhan. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui dampak dari kegiatan penyuluhan kepada sasaran utama penyuluhan, sehingga dapat diketahui pengembangan yang dapat dilakukan agar pelaksanaan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Agenda sistem pelatihan dan penyuluhan lainnya seperti uraian dibawah ini

1) Strategi Pengembangan Sistem Bisnis Perikanan di Pedesaan

Sistem Bisnis Perikanan di pedesaaan diarahkan kepada tujuan menjadikan usaha sektor KP sebagai usaha yang *profitable* dan berkelanjutan dengan pengelolaan organisasi dan keuangan yang baik. Dengan sentuhan pelatihan dan penyuluhan, diharapkan usaha-usaha sektor KP mejadi bagian dari UMKM yang mampu meningkat kelasnya dan menghasilkan produk-produk lokal unggulan yang mengarah pada ekspor. Hal ini tentunya akan mampu meningkatkan skala usaha pelaku utama/usaha, sehingga mampu meningkatkan pendapatannya, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP.

Terdapat 5 (lima) agenda pokok pengembangan Pelatihan dan Penyuluhan, yaitu:

a. Pengembangan *Sistem Pelatihan dan Penyuluhan* yang yang efisien, efektif, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
b. Peningkatan kompetensi *Aparatur* sebagai dinamisator dan motivator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan;
c. Peningkatan Kapasitas *Pelaku Utama/Pelaku usaha* sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan menuju UMKM KP yang unggul dan naik kelas;
d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan;
e. Pengembangan Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan.

Kelima agenda pokok pengembangan Pelatihan dan Penyuluhan selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Harapannya untuk mencapai UMKM KP yang meningkat kelasnya, pelatihan dan penyuluhan akan berperan dalam:

a. Identifikasi Pelaku utama/usaha yang produktif dan *feasible* ;
b. Analisis permasalahan pada kondisi wilayah dan usaha yang dikembangkan;
c. Bimbingan teknis produksi, transfer teknologi, legalitas usaha, sertifikasi dan perizinan lainnya yang mengarah pada peningkatan kemampuan teknis dan manajerial bisnis;
d. Bimbingan riset pemasaran, strategi dan keputusan bisnis;
e. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan bisnis perikanan;
f. Fasilitasi informasi Pelatihan, pemagangan, inkubasi bisnis dan peningkatan SDM lainnya; dan
g. Fasilitasi akses sumber informasi lembaga pemasaran dan lembaga keuangan (*net working*).

2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SIMLAT)

Berkaitan dengan agenda pengembangan sistem informasi manajemen pelatihan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama Pengembangan manajemen sistem informasi pelatihan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada Isi SIMLAT yang informatif dan terkini.

Sasaran Kedua Pengembangan SDM pengelola. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Peningkatan kompetensi dalam hal mengelola perangkat lunak dan perangkat keras jaringan SIMLAT (*troubleshooting*); dan (2) Peningkatan kompetensi dalam mengoperasikan SIMLAT.

Sasaran Ketiga Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi pelatihan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengembangan sarana untuk memenuhi kebutuhan minimal beroperasinya SIMLAT secara terintegrasi; dan (2) Pengembangan modul pelatihan multimedia berbasis internet.

3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH)

Berkaitan dengan agenda pengembangan sistem informasi manajemen penyuluhan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama Pengembangan manajemen sistem informasi penyuluhan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Isi SIMLUH yang informatif dan terkini serta (2) Link SIMLUH dengan pelaporan penyuluh perikanan, Cyber extention, informasi pasar dan lain sebagainya.

Sasaran Kedua Pengembangan SDM pengelola. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Peningkatan kompetensi dalam hal mengelola perangkat lunak dan perangkat keras jaringan SIMLUH (*troubleshooting*); dan (2) Peningkatan kompetensi dalam mengoperasikan SIMLUH.

Sasaran Ketiga Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi penyuluhan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengembangan sarana untuk memenuhi kebutuhan minimal beroperasinya SIMLUH secara terintegrasi; dan (2) Pengembangan materi penyuluhan multimedia berbasis internet.

3.5 Kegiatan Prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2020- 2024, adalah :

a. Pelatihan KP

Kegiatan prioritas pelatihan pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan KP yang difokuskan pada :

1) Pelatihan Masyarakat KP
2) Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan
3) Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan
4) Sertifikasi kompetensi Masyarakat KP
5) Sarana Prasarana Pelatihan KP

b. Penyuluhan KP

Kegiatan prioritas penyuluhan KP pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan KP yang difokuskan pada :

1) Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
2) Penguatan kelembagaan kelompok KP
3) Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan izin usaha di sektor KP
4) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan
5) Sarana prasarana penyuluhan KP

3.6 Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020-2024, memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020-2024, disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan KKP, yang meliputi:

1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan;
2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Melalui Penyesuaian/*Inpassing;*
3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Mekanisme Kerja Kelembagaan Penyuluhan Perikanan;
4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penilaian dan Penetapan Kelompok Perikanan Teladan/Berprestasi Nasional Pusluh KP;
5) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

6) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
7) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perikanan;
8) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Medan, BPPP Ambon, BPPP Bitung;
9) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
10) Rancangan Permen tentang Pedoman Penyuluhan Perikanan;

Selain itu, Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BRSDM Terkait Pelatihan dan Penyuluhan KP tentang:

- ✓ Penugasan Penyuluh Perikanan PNS;
- ✓ Penetapan Kinerja Penyuluh Perikanan;
- ✓ Wilayah Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan serta Balai Riset dan Penyuluhan;
- ✓ Rancangan Induk Pengembangan (RIP) SKKNI dan KKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
- ✓ Pedoman Pelatihan Aparatur KP;
- ✓ Pedoman Pelatihan Masyarakat.

3.7 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kegiatan Pelatihan dan penyuluhan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta

masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan lebih diarahkan kepada pendampingan kepada kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran *(output)* dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan *(output).* Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yangsecara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat. Sasaran Strategis Program Pengembangan SDM KP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome| impact*) dari satu atau beberapa program. Rincian Indikator Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 10. Indikator Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SS 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	kelompok	2518	2518	2873	2973	3000
				2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	kelompok	39	35	69	71	73
				3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	kelompok	97	100	100	100	100
3	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	SS 3. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	4	Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	60	60	60	60	60
				5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	5	10	17	18	20
				6	Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi	orang	0	0	300	350	400
				7	Masyarakat KP yang dilatih	orang	1165	2893	2893	2893	10000
				8	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training" BPPP Ambon	Paket	0	20	20	20	20
				9	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP Ambon	Paket	0	4	4	4	4

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
				10	Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan	unit	1	1	6	7	8
				11	Sarana dan prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	0	1	1	1	1
				12	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat	lembaga	1	1	1	1	1
4	SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	SS 4 . Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	13	Jumlah desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP	paket	1	1	1	1	1
5	SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRSDM (indeks)	Indeks	72	72	72	72	72
				15	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon	Nilai	0	80	80	80	80
				16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon	%	82	84	84	84	84
				17	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon	Nilai	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)
				18	Nilai Kinerja Angaran BPPP Ambon	Nilai	86	86	86	86	86

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
				19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK (%)	%	1	0	0	0	0

4.1.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil *(outcome)* dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program *(outcome).* Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran.

4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Program kegiatan kerja BPPP Ambon sesuai rencana strategis tahun 2020 - 2024 adalah pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan kegiatan meliputi:

1) Penyelenggaraan Pelatihan bagi masyarakat Kelautan dan perikanan;
2) Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
3) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha, terdiri dari penumbuhan kelompok perikanan dan peningkatan kelas kelompok serta pendampingan pelaku utama/usaha menjadi UMKM-KP yang mendapat kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan pembuatan ijin usaha;
4) Dukungan operasional Penyuluh Perikanan yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat KP;
5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan penyuluhan, kegiatan ini terdiri dari Pengadaan kendaraan fungsional pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, Pengadaan pengolahan Data;
6) Pengembangan Kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, meliputi Pengembangan Ketenagaan Kelautan dan Perikanan, Penyusunan Pedoman/standar/juknis/juklak, Penyusunan database, dan Penyusunan kurikulum, modul pelatihan serta metode dan materi penyuluhan;
7) Pelayanan Perkantoran, kegiatan ini terdiri dari Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penyiapan bahan-bahan pimpinanan;

8) Dokumen Perencanaan, Data informasi dan Kerjasama, kegiatan ini terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja, KAK, RAB, dan RKAKL, Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya Khusus Pelatihan dan Penyuluhan KP, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rumusan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Rapat Konsolidasi Perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan KP, Koordinasi perencanaan program dengan instansi terkait, penyusunan database dan statistik pelatihan dan penyuluhan KP, Kerjasama pelatihan dan penyuluhan dengan instansi terkait lainnya, Sistem informasi, Publikasi, dan Pameran.
9) Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi, kegiatan ini terdiri dari Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan, Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penyuluhan KP, dan Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.
10) Dokumen Ketatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara, kegiatan terdiri dari Penyusunan laporan Keuangan dan BMN, Pengelolaan Administrasi Persuratan, Penyusunan Juklak Pelaksanaan Puslatluh KP, dan PBJ.
11) Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan, kegiatan ini terdiri dari Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Implementasi SIMPEG.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pelatihan dapat bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait, APBD serta sumber lain yang tidak mengikat.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra

mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020 –2024 dan PNBP Tahun 2020 -2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikana (BPPP) Ambon tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan perikanan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Puslatluh KP tahun 2020 - 2024 dan perjanjian Kinerja Puslatluh KP Tahun 2021. Rencana Strategis BPPP Ambon ini disusun untuk memberikan pedoman atau panduan sesuai dengan perkembangan arah kebijakan dan peraturan terkait dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP tahun 2020-2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

Selanjutnya guna mendukung peran strategis BPPP Ambon dalam melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan melalui penataan regulasi dan peningkatan sumber daya KP.

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN AMBON,

ABU BAKAR

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NOMOR: SK.1253/BPPP/RC.221/VI/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2020 – 2024 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON NOMOR : 1168/ BPPP/RC.221/VII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2020 – 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan program Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020 – 2024

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tentang perubahan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor 1168/BPPP/RC.221/VII/2020 tentang Rencana Strategis Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2019, tentang pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan, 1995);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan,
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2011, tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan,
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/Per-BRSDM/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.
11. Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.311/BRSDM.5/RC.221/V/2021 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 622/BRSDM.05/RC.221/VII/2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2020 – 2024

Pasal 1

Mengubah Lampiran I, II dan II dalam pasal 4 keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon 1168/BPPP/RC.221VII/2020 tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020-2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Balai ini.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 07 Juni 2021

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN AMBON,

ABU BAKAR

Lampiran I.
Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Nomor:1253/BPPP/RC.221/VI/2021
Tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020-2024

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/ MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human–centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber–physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network*/komunikasi, sedangkan society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber–physical–human systems*. Pada era *society* 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga kesimbangan maupun keharmonisan

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*tranfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dibawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;

2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

B. Tujuan Penyusunan Renstra

Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi BPPP Ambon dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan periode 2020–2024 secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis, baik di dalam maupun antar sub-sektor terkait. Penyusunan Renstra BPPP Ambon mengacu kepada: 1) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025; 3) Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024; 4) Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024; dan Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Renstra BPPP Ambon berisikan penjelasan tentang struktur organisasi, sumberdaya manusia (SDM, sarana dan prasaran, anggaran), kinerja pada periode sebelumnya (2015 – 2019), uraian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP yang akan dilaksanakan oleh BPPP Ambon periode 2020–2024. Renstra ini disusun berdasarkan analisis strategis dan potensi, peluang, permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi pembangunan KP dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

C. Kondisi Umum

1. Organisasi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan BPSDM KP Nomor : 46/KEP-BPSDMKP/2014, tanggal 20 Mei 2014 mempunyai Wilayah Kerja meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Wilayah Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar sehingga untuk pemanfaatannya dituntut pula peningkatan keterampilan sumberdaya manusia yang berkompeten dan berdedikasi tinggi dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan program peningkatan sumberdaya manusia yang menjadi sasaran pokok kegiatan pembangunan bangsa ke depan.

Dengan makin meningkatnya Pembangunan Perikanan di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara maka BPPP Ambon semakin berperan untuk meningkatkan keterampilan para petugas pembangunan di bidang peningkatan SDM Perikanan. Hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan bagian integral dari pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.

a. Tugas Pokok

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Ambon menyelenggarakan fungsi (1) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan; (2) Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan; (3) Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan; (4) Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan; (5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan; (6) Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan; (7) Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; (8) Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta; dan (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugasnya melakukan adminstrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan. Seksi Program dengan tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran pelatihan dan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan. Seksi Pelatihan dengan tugas melakukan persiapan kegiatan pelatihan. Seksi Penyuluhan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi dan melakukan administrasi dengan penyuluh wilayah kerja. Sedangkan kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

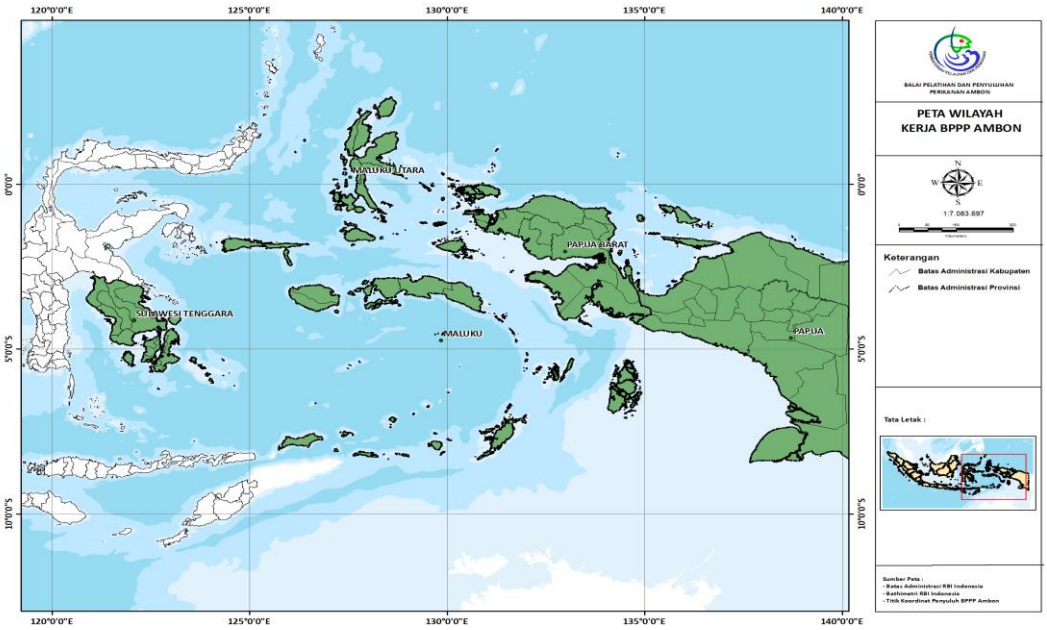

Gambar 1. Peta wilayah kerja BPPP Ambon

c. Susunan Organisasi

Gambaran Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dapat dilihat pada gambar berikut :

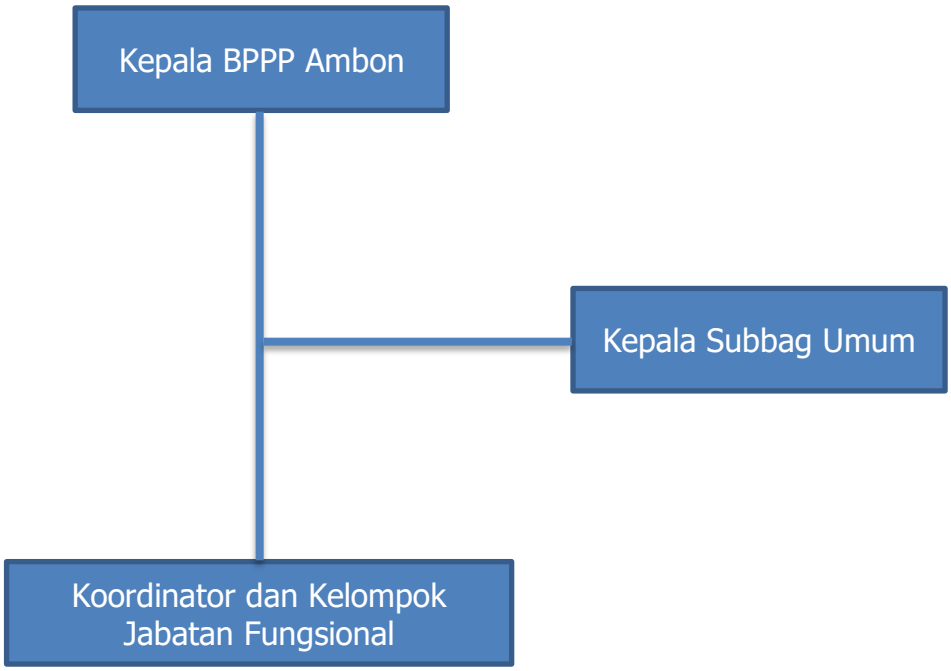

Gambar 2. Struktur Organisasi BPPP Ambon

2. Sumberdaya

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sejalan dengan visi dan misi KKP, kegiatan pelatihan dan penyuluhan juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sehingga keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menjadi sangatlah relevan.

a. Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Total Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon berjumlah 394 orang yang dipimpin oleh Kepala Balai, data pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. ***Jumlah SDM BPPP Ambon***

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	**Kepala Balai**	1 Orang
2	**Sub Koordinator**	4 Orang
3	**Sub Bagian Tata Usaha**	
	Kepegawaian	2 Orang
	Keuangan	4 Orang
	Rumah Tangga dan Perlengkapan	5 Orang
	Teknisi	5 Orang
4	**Seksi Program**	2 Orang
5	**Seksi Pelatihan**	1 Orang
6	**Seksi Penyuluhan**	2 Orang
7	**Fungsional Tertentu :**	
	Widyaiswara	5 Orang
	Instruktur	14 Orang
	Arsiparis	1 Orang
	Penyuluh	248 orang
8	**Tenaga Kontrak**	
	Tenaga Teknis	3 orang
	Pramubakti	6 orang
	Tenaga Sopir	2 orang
	Petugas Keamanan	3 orang
	Tenaga Dokter	1 orang
	Penyuluh Perikanan Bantu	85 orang
	Jumlah Total	**394 Orang**

Sumber : Kepegawaian BPPP Ambon

b. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana berupa aset yang dimiliki oleh BPPP Ambon meliputi aset terkait pelaksanaan fungsi pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan diantaranya gedung, asrama, ruang kelas, *workshop* dan sarana praktek untuk mendukung dalam menghasilkan sebuah output keluaran dari kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Aset BPPP Ambon tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran.

c. Capaian Program dan Kegiatan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sampai dengan saat ini telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM KP dengan capaian sebagai berikut:

1) Jumlah lulusan pelatihan masyarakat pada tahun 2020 sebanyak 1.165 orang. Adapun capaian kegiatan pelatihan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019, disajikan ke dalam tabel 3.

Tabel 2. *Jumlah lulusan pelatihan aparatur dan masyarakat tahun 2015 – 2020.*

Realisasi lulusan pelatihan (orang)											
2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat	Aparatur	Masyarakat
307	2.665	275	2.540	0	840	120	1592	0	3.436	0	1.165

Sumber : Seksi Pelatihan BPPP Ambon

2) Jumlah kelompok mandiri pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok. Adapun jumlah kelompok pelaku utama kp wilayah Satminkal BPPP Ambon mulai dari tahun 2015 -2019 sebagaimana tersaji ke dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 3. *Jumlah kelompok pelaku utama KP , 2015 – 2020*

Satuan: Kelompok

No	Provinsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Maluku	912	1,059	978	786	786	885
2	Maluku Utara	1,060	1,147	630	425	425	629
3	Papua Barat	512	464	172	220	220	429
4	Papua	694	829	460	466	466	743
Jumlah		**3.178**	**3.499**	**2.240**	**1.897**	**1.897**	**2.686**

Sumber: Puslatluh KP dan Seksi Penyuluhan BPPP Ambon

3) Jumlah Sertifikasi kompetensi yang telah dihasilkan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 4.523 asesi. Data sertifikasi kompetensi menurut bidang kompetensi tahun 2015 – 2020, sebagaimana tabel dibawah

Tabel 4. *Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDMKP menurut Bidang Kompetensi Tahun 2015 – 2020*

No	Kompetensi	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Penangkapan Ikan	276	440	17	113	0	846
2	Budidaya Perikanan	336	160	398	81	20	995
3	Mesin Perikanan	186	170	55	0	0	411
4	Pengolahan Hasil Perikanan	869	260	370	126	280	1.905
5	Penyuluh Perikanan	0	0	0	0	0	0
6	Kelautan	202	60	0	0	0	82
7	Pengolahan Hasil Perikanan non konsumsi	84	20	0	0	0	104
	Jumlah	**1.953**	**1.110**	**840**	**320**	**300**	**4.523**

Sumber : LSP 1 BPPP - Ambon

d. Kondisi dan Sasaran

Penjabaran terkait dengan kondisi umum kegiatan pelatihan dan penyuluhan sekaligus sasarannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kondisi SDM Aparatur BPPP Ambon

Perkembangan jumlah SDM aparatur BPPP Ambon dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan jumlah pegawai yang memasuki masa purnabakti dan meninggal lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penambahan pegawai di BPPP Ambon. Tabel 5 menunjukkan perubahan jumlah total SDM aparatur KP BPPP Ambon.

Tabel 5. *Jumlah pegawai menurut unit kerja dan golongan lingkup BPPP Ambon, tahun 2015 – 2020*

2015				2016				2017				2018				2019				2020			
Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang				Gol/Ruang			
I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	21	28	2	-	21	29	3	0	13	34	3	0	12	33	3	0	10	33	4	0	10	30	7
52				53				50				48				47				47			

Sumber: Kepegawaian BPPP Ambon

2) Penyuluh Perikanan Satminkal BPPP Ambon

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Namun dengan berjalannya waktu, ada beberapa penyuluh yang memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan beralih jabatan ke fungsional lainnya, sehingga saat ini jumlah Penyuluh Perikanan Wilayah Satminkal BPPP Ambon dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. *Jumlah SDM Penyuluh Perikanan PNS*

Satuan : Orang

No	PROVINSI	PNS	PPB
1	MALUKU	60	36
2	MALUKU UTARA	59	17
3	PAPUA	71	21
4	PAPUA BARAT	58	12
	TOTAL	**248**	**85**

*Sumber: Seksi Penyuluhan BPPP Ambon * Data s.d. Juni 2021*

Selain Penyuluh Perikanan PNS, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP juga merekrut 34 Orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan 85 orang berada diwilayah Satminkal BPPP Ambon, dimana Penyuluh Perikanan Bantu ini ikut berperan dalam penyelenggaraan penyuluh kepada sasaran penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Tugas Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai dengan peranannya adalah sebagaimana berikut:

1. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan;
2. Mendampingi kelompok perikanan di wilayah binaan yang ditetapkan;
3. Menumbuhkan kelompok perikanan di wilayah binaan yang ditetapkan;
4. Menilai Kelas Kelompok kelautan dan perikanan di wilayah binaan yang ditetapkan;
5. Meningkatkan kelas kelompok perikanan;
6. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha Mikro Kecil Sektor KP;
7. Melakukan pembinaan koperasi sektor KP;
8. Memfasilitasi akses permodalan usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari perbankan atau non perbankan;
9. Fasilitasi pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mendapatkan bantuan akses pasar hasil perikanan;
10. Memfasilitasi akses informasi dan teknologi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
11. Mensosialisaskan peraturan terkait kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;

12. Mendampingi program prioritas kkp termasuk bantuan Pemerintah kementerian kelautan dan perikanan tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
13. Melakukan pendataan dan atau Updating data Objek KP;
14. Membuat Laporan.

3) Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari pelaku utama/usaha yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, penggiat konservasi dan masyarakat profesi lainnya. Jumlah pelaku utama/usaha kelautan perikanan saaat ini mencapai 6,5 jt orang yang 90% diantaranya berusaha dalam skala mikro dan tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat untuk RTP pengolahan dan sedikit mengalami penurunan untuk dua RTP lainnya.

(1) Nelayan

Sebagian besar nelayan bekerja di perikanan tangkap di laut dibanding dengan nelayan perairan umum. Jumlah nelayan menurut sub sektor perikanan tangkap tahun 2018 di wilayah kerja BPPP Ambon sebanyak 335.800 orang.

Tabel 7. *Jumlah Nelayan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap, 2018*

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan (Orang)
1	Sulawesi Tenggara	83.970
2	Maluku	124.914
3	Maluku Utara	16.607
4	Papua	78.568
5	Papua Barat	31.741
TOTAL		**335.800**

Sumber: Satu Data KKP 2018

(2) Pembudidaya Ikan

Pembudidaya ikan baik budidaya ikan air tawar, payau maupun laut di wilayah kerja BPPP Ambon pada tahun 2018 sebanyak 221.723 orang .

Tabel 8. *Jumlah Pembudidaya ikan, 2018*

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan (Orang)
1	Sulawesi Tenggara	130.608
2	Maluku	54.870
3	Maluku Utara	6.020
4	Papua	15.678
5	Papua Barat	14.547
TOTAL		**221.723**

Sumber: Satu Data KKP 2018

(3) Pengolah Hasil Perikanan

Tenaga kerja bidang pengolah dibagi menjadi tenaga kerja pengolah dan tenaga kerja pemasaran. Perkembangnya pada tahun 2018 sebanyak 1.422 orang.

Tabel 9. *Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, tahun 2018*

No.	Provinsi	Jumlah Pengolah/Pemasaran (Orang)
1	Sulawesi Tenggara	352
2	Maluku	503
3	Maluku Utara	234
4	Papua	141
5	Papua Barat	192
TOTAL		**1.422**

Sumber: BPPP – Ambon, 2018

(4) Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha

Kegiatan penyuluhan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku utama, pelaku usaha dan keluarganya. Dengan demikian karakteristik dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha menjadi faktor yang harus diperhatikan. Sasaran kegiatan penyuluhan lebih kepada kelompok pelaku utama/usaha bukan individu. Kelembagaan kelompok pelaku utama di sektor perikanan yang ada saat ini sangat bervariasi baik dari kemampuan kelas kelompok maupun dari jenis komoditas yang diusahakan. Sebagian besar kelompok pelaku utama tidak hanya melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan, umumnya mereka juga melaksanakan kegiatan usaha diluar sektor perikanan seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan lainnya.

4) Kurikulum, Modul dan Diklat Internasional

Kurikulum dan modul yang sudah dibuat berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah kurikulum dan modul pelatihan teknis bagi non aparatur. Sarana dan Prasarana Pelatihan antara lain Sarana *Basic Safety Training (BST)* .

Penyelenggaraan pelatihan yang bertaraf internasional, sesuai konvensi STCW-F (International Convention on Standards of Training, Sertification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) 1995 yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO) mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan bagi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, mencakup pelatihan terkait:

- Diklat Keselamatan Dasar (*Basic Safety Training*);
- Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN)

5) Kerjasama

BPPP Ambon senantiasa berupaya membangun jaringan kerja sama yang luas dengan seluruh pihak terkait dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan. Kegiatan fasilitasi kerja sama pelatihan yang telah dijajagi meliputi: kerjasama antara Pusat Pelatihan KP dengan Pemerintah daerah, kementerian, dunia industri dan institusi lain di dalam maupun di luar negeri.

Pelatihan-pelatihan yang dijadikan sebagai konstribusi KKP didunia internasional, seperti : *International Training on Fisheries for African and Middle East Countries* bagi 13 negara Afrika dan Timur Tengah, yaitu Senegal, Aljazair, Anggola, Djibouti, Sudan, Kenya, Nigeria, Mesir, Mozambik, Madagaskar, Namibia, Mauritania dan Zimbabwe.

6) Sasaran pelatihan KP

Program pelatihan KP diwilayah kerja BPPP Ambon dalam periode waktu 2017-2019, telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi dukungan kegiatan pelatihan terhadap program prioritas seperti peningkatan kompetensi, Kegiatan mendukung pencapaian Indkator Kinerja Utama (IKU) KKP, program Bantuan Pemerintah, Program SKPT, Program Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan program prioritas lainnya.

Gambar 4. Sasaran Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan

7) Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)

Lembaga pelatihan/permagangan di bidang kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama maju di bidang kelautan dan perikanan baik perorangan maupun kelompok. P2MKP merupakan wujud partisipasi dan keswadayaan masyarakat ikut mengembangkan SDM melalui pelatihan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jumlah P2MKP yang berada diwilayah kerja BPPP Ambon berdasarkan SK Kepala BRSDM KP Nomor 135/KEP-BRSDM/2018 sebanyak 5 (lima) lembaga antara lain :

1. P2MKP Wolio Sanck bidang Pengolahan hasil perikanan di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. P2MKP Marine Center Saro bidang pembenihan ikan air laut di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
3. P2MKP Nacha bidang Pengolahan hasil perikanan di Kota Ambon Provinsi Maluku.
4. P2MKP Sweet Hatukau bidang kerajinan kerang di Kota Ambon Provinsi Maluku.
5. P2MKP Sumber Rezeki bidang kerajinan kerang di Kota Ambon Provinsi Maluku.

8) Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan

Peran BRSDM KP melalui penyuluhan, sebagaimana diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, status kepegawaian penyuluh perikanan sudah dialihkan dari daerah ke pusat. Kondisi ini menjadi energi baru bagi KKP dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, institusi non pemerintah, dan stakeholder lainnya. Peran penyuluh sebagai *center of excellence, agent of change* (agen perubahan) dan *agent of empowerment* (agen pemberdayaan) mendukung pencapaian tujuan program KKP. Penyuluh harus mampu memberikan pelayanan pada masyarakat, termasuk termasuk melakukan transformasi budaya sebagai salah satu pilar poros maritim. Penyuluh juga memiliki tugas untuk menyampaikan hasil riset dan pelatihan kepada pelaku utama, mampu memerangi kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*, degradasi lingkungan pesisir dan laut, meningkatkan produktivitas perikanan, memperluas akses permodalan, serta meningkatkan kualitas SDM pelaku utama perikanan.

Peran penyuluh yang telah dilakukan pada periode 2015 – 2019 diantaranya:

- Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
- Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
- Pendampingan Bantuan Pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, *ice flake*, dll.);
- Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
- Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
- Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;

- Pendampingan dan Penyuluhan di 12 SKPT;
- Pendataan Pelaku Usaha KP (KUSUKA) dan *sampling* produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
- Pengusulan dan Pemanfaatan Bale Kusuka sebagai sarana informasi pembangunan KP dan penyuluhan pelaku utama.

Bentuk kelembagaan penyuluhan perikanan meliputi:

✓ Tingkat pusat

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang menangani penyuluhan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

✓ Tingkat regional

Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua;

Satuan administrasi pangkal untuk kepegawaian penyuluh perikanan, akan berada di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon, sementara Penyuluh Perikanan tetap berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan atau Dinas yang menangani perikanan di Kabupaten/Kota.

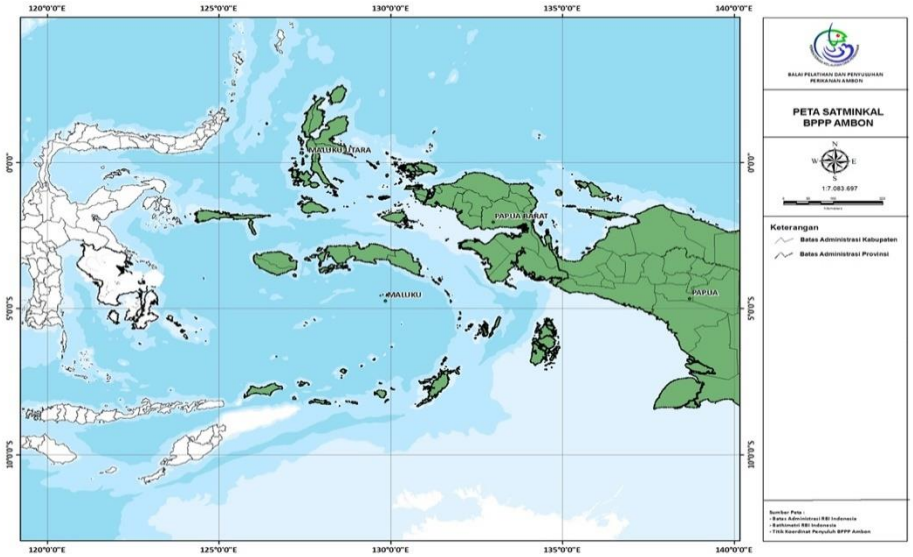

Gambar 5. Wilayah Kerja (Wilker) Satminkal BPPP Ambon

3. Potensi

Keberadaan SDM KP khususnya diwilayah timur Indonesia yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi BPPP Ambon, 5 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 5 widyaiswara dan 14 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi/BNSP dengan menggunakan standar SKKNI, KKNI dan SKK.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2020 terdapat 342 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 87 orang Penyuluh Perikanan bantu, 255 orang penyuluh PNS, tersebar di wilayah kerja Satminkal BPPP Ambon. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat.

Implementasi program digitalisasi pelatihan dan penyuluhan KP yang siap operasional tahun 2020 yaitu online training untuk pelatihan dan E-Penyuluh untuk kegiatan penyuluhan KP. Kedua aplikasi tersebut dirancang bangun kerjasama Puslatluh KP dengan Pusdatin dengan pembiayaan rancang bangun *software* oleh Pusdatin Setjen KKP. Aplikasi Online Training bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan yang menjangkau kawasan yang luas, biaya

murah, terakreditasi, tidak terkendala waktu, cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu, dalam rangka mengembangkan Sistem Kerja *Smart Office* bagi Aparatur Sipil Negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan terpilih menjadi salah satu pusat percontohan role model ASN berkerja secara mobile dari rumah. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. Setiap kinerjanya akan dipotret melalui sistem E-Penyuluh. Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan. Beberapa informasi terkait e-Penyuluh sebagai berikut:

a. Aplikasi e-Penyuluh merupakan adalah alat bantu dalam bentuk aplikasi berbasis web dan mobile bagi Penyuluh Perikanan dengan subtansi pokok pelaporan aktivitas dan kinerja Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok Penyuluhan dan pendampingan pada pelaku utama KP (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam) dan pelaku usaha KP di tingkat lapangan.
b. Manfaat e-Penyuluh antara lain:
    1) Hasil kegiatan diinput langsung dalam modul e-penyuluh yang telah dipasang di handphone;
    2) Modul e-penyuluh dapat dibuka dan diinput secara off-line tidak tergantung jaringan internet;
    3) Laporan kegiatan dan capaian target (kinerja) dibuat otomatis dalam format standar yang telah ditentukan dengan konten informasi diambil dari data yang telah diinput;
    4) Modul e-penyuluh terintegrasi dengan modul KUSUKA dan Pendataan Produksi, Kegiatan pendataan dapat dilakukan pada perangkat handphone yang sama;
    5) Kehadiran tercatat sesuai waktu masuk saat mengisi informasi kegiatan dan waktu keluar saat selesai melakukan kegiatan.

4. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Ambon dalam mengembangkan SDM guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan, dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) aspek, yaitu:

Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:

a. Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
b. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yanag dilaksanakan di P2MKP (safari), mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
c. Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP seperti di Wilayah Perbatasan, SKPT dan lainnya;
d. Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
e. Belum ada model pelatihan berbasis daring yang mudah diakses baik nasional maupun International;
f. Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
g. Rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP disetiap wilayahnya;
h. Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;

i. Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dibidang kelautan dan perikanan

j. Standard kompetensi masih terbatas jumlahnya;

k. Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;

l. Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatkan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan;

m. Aspek pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya:

n. Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;

o. Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;

p. Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;

q. Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer;

r. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah;

s. Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasi.

t. Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

u. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;

v. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;

w. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;

x. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;

y. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;

z. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

1. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
2. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
3. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai ;
4. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
5. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
6. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
7. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
8. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaran penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

D. Lingkungan Strategis

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, serta evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan, tugas tersebut dilakukan dengan melakukan fungsi-fungsi: Penyiapan penyusunan bahan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan; Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan

penyuluhan kelautan dan perikanan; Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPPP Ambon. Selain itu, juga tetap memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pelatihan dan penyuluhan dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

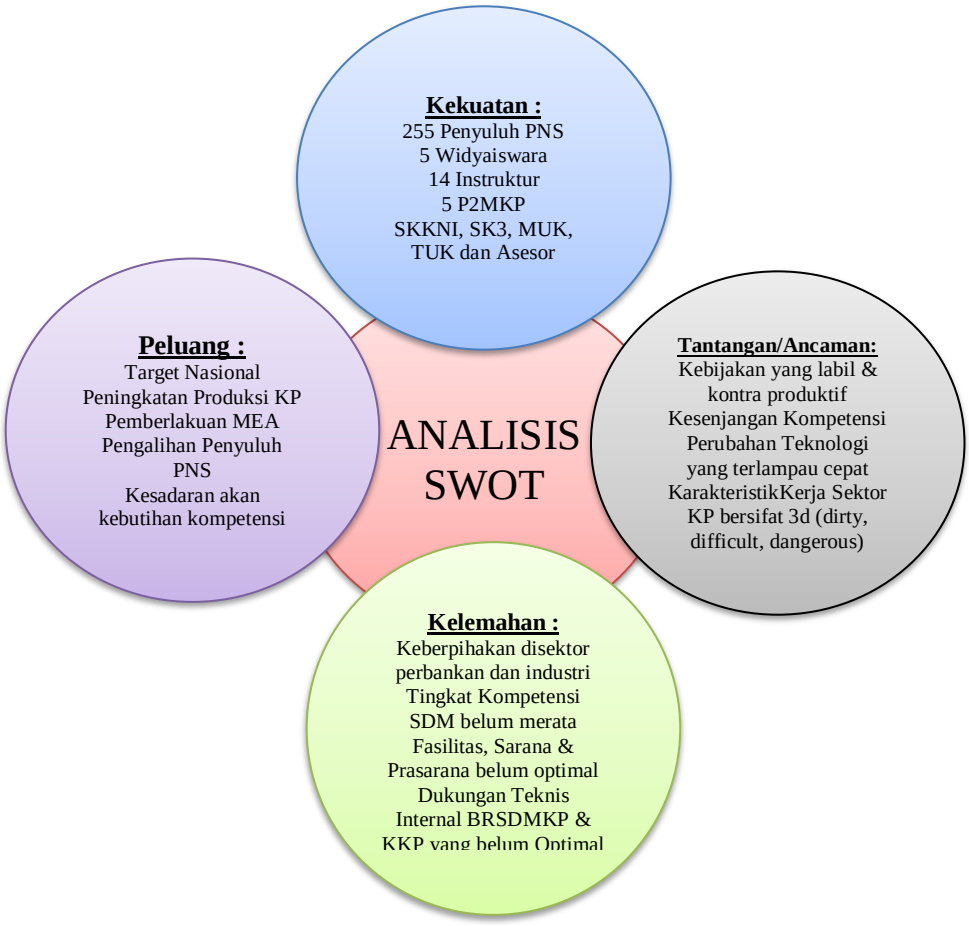

Gambar 6. Ilustrasi analisis SWOT kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP

Secara teoritis, lingkungan strategis ini dapat diartikan sebagai situasi faktor yang strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BPPP Ambon. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi faktor yang strategis tersebut adalah faktor-faktor strategis yang bersumber dari internal (*Internal Factor Strategic*) maupun eksternal (*External Factor Strategic*) baik yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah baik di tingkat global, regional, nasional maupun sektoral. Faktor-faktor strategis internal tersebut meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknes*), sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Situasi internal dan eksternal dalam lingkungan strategis yang dihadapi BRSDM KP meliputi:

1. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal

a. Tingkat Global

1) Adanya persyaratan kompetensi untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan sehingga mampu bersaing sesuai *guidelines for development of Regional Model Competensy Standards (RMCS) ILO*;
2) Adanya pemenuhan persyaratan tentang kapasitas kelembagaan dan SDM bidang penangkapan ikan yang mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga awak kapal sesuai dengan konvensi yang dikeluarkan oleh IMO (*STCW-F 1995*);
3) Perkembangan era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah memicu digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor dalam proses industri serta menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik;
4) Kompetensi pada bidang teknologi informasi yang harus dimiliki SDM KP untuk menghadapi persaingan di era globalisasi dan ekonomi digital;

b. Tingkat Regional

1) Implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat regional (APEC, MEA, dan WTO) maupun antar negara yang bersifat bilateral, membutuhkan penyiapan riset dan SDM yang unggul;
2) Penetapan standar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan *ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognation of Competency Certification System;*
3) Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan konsumsi ikan;
4) Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan BRSDM KP.

c. Faktor Strategis Lingkungan Internal di Tingkat Nasional

1) Konektivitas antar pulau;
2) Potensi sumber daya KP yang melimpah dimanfaatkan secara optimal karena 90% pemanfaat didominasi skala kecil baik di laut maupun perairan umum daratan;
3) Produk perikanan primer yang memiliki nilai tambah rendah masih mendominasi struktur perekonomian sektor KP;
4) Tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat KP masih rendah.

E. Isu Strategis

Dalam merespon sejumlah isu yang berkembang disektor kelautan dan perikanan, keberadaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berperan sangat penting. Beberapa isu strategis yang memerlukan kontribusi dari hasil pelatihan dan penyuluhan dikaitkan dengan program nasional dan kementerian, diantaranya adalah:

a. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi di pulau terdepan, dengan sasaran untuk : (a) meningkatkan ekonomi rumah tangga kelautan dan perikanan, (b) menambah usaha kelautan dan perikanan menengah ke atas menjadi berdaya saing, dan (c) menjadikan sektor kelautan

dan perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional.

b. Pengembangan *enterprenuership* menuju *technopreneurship*, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan iptek untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dengan didukung oleh tata kelola yang baik (*good governance*). Para pelaku usaha KP perlu difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, akses terhadap permodalan, pemasaran hasil dan akses terhadap teknologi serta informasi, termasuk peningkatan kemampuan dalam menjalankan *co-management* pengelolaan sumberdaya KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan;

c. Peningkatan keterampilan dan kompetensi dibidang teknik budidaya ikan (akuakultur), penangkapan, pengolahan produk dan peningkatan nilai tambah, keamanan pangan, konservasi melalui pengenalan alat tangkap ramah lingkungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim, termasuk didalamnya memperkenalkan mata pencaharian alternatif.

d. Dalam bidang ekonomi dan industri, pada tahun 2016 Indonesia memasuki era *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai konsekuensi dari berlakunya kesepakatan internasional. Beberapa persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam rangka menghadapi MEA, yaitu: 1) masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); 2) rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja; 3) pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah; 4) meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 5) ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi; 6) sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah; 7) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN; ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA; 8) tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta 9) masalah Tenaga Kerja Indonesia

yang banyak tersebar di luar negeri.

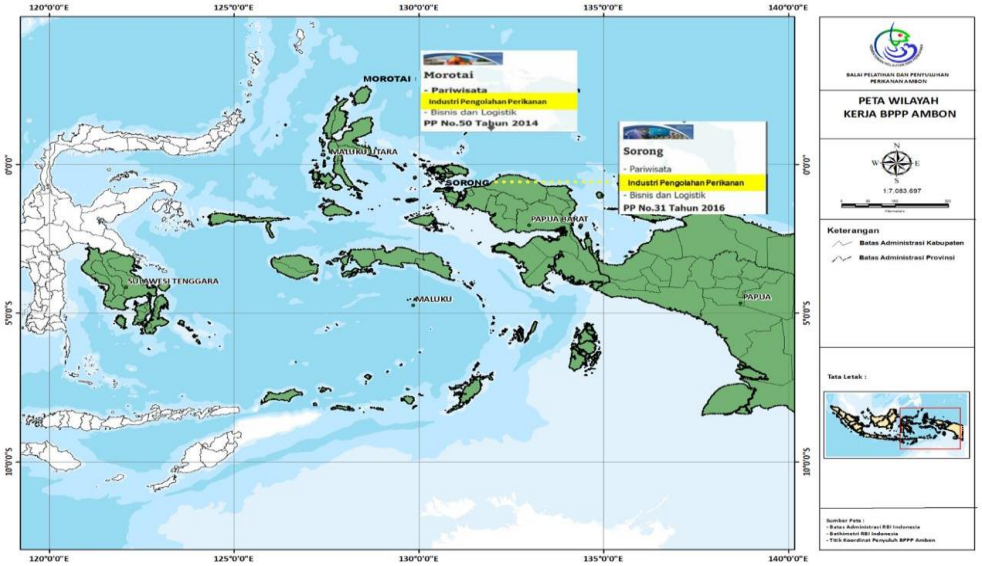

Gambar 7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wilayah kerja BPPP Ambon yang membutuhkan peranan pelatihan dan penyuluhan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP, visi BRSDM dan visi Puslatluh KP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

1.2 Misi

Misi BPPP Ambon adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Puslatluh KP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

1.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BRSDMKP. Untuk itu tujuan pelatihan dan penyuluhan KP adalah menghasilkan SDMKP mandiri dan kompeten yang dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri serta mampu menjadi wirausaha dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan secara optimal serta sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya KP, dengan indikator tujuan adalah:

1) Tersedianya lembaga pelatihan dan penyuluhan KP sesuai dengan standard;
2) Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sesuai standard;
3) Tersedianya tenaga pelatihan dan kepelatihan yang profesional;

4) Peserta latih yang kompeten;
5) Jumlah kelompok pelaku utama yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya;
6) Penyuluh perikanan yang kompeten dan berdaya saing.
7) Terwujudnya tata Kelola yang baik dilingkup BPPP Ambon.

1.4 Sasaran Strategis BPPP Ambon 2020 - 2024

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 - 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Ambon dalam mendukung target kinerja sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan

SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab

SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing

SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif

SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai BRSDM pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SS1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

SS2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS4 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan

SS5 Tatakelola pemerintahan yang baik

Selanjutnya Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BRSDMKP adalah sebagai berikut :

SS1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

SS2 Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS4 Tatakelola pemerintahan yang baik

Maka BPPP Ambon, dengan memperhatikan misi KKP, tujuan BRSDMKP dan sasaran strategis Puslatluh KP tahun 2020-2024, sasaran strategis yang akan dicapai BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP, BRSDMKP dan Puslatluh KP adalah sebagai berikut :

SS1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

SS2 Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

SS4 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dalam penyusunannya, BPPP Ambon menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective, Customer perspective, Internal Process perspective,* dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah "Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja:

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. SS ini diturunkan ke BRSDM dan Puslatluh KP menjadi "Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP" dengan IKU yaitu:

1. Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon pada tahun 2020 sebanyak 2.518 kelompok, tahun 2021 sebanyak 2.518 kelompok, tahun 2022 sebanyak 2.873 kelompok, tahun 2023 sebanyak 2.973 kelompok dan tahun 2024 sebanyak 3.000 kelompok.
2. Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon pada tahun 2020 sebanyak 39 kelompok, tahun 2021 sebanyak 35 kelompok, tahun 2022 sebanyak 69 kelompok, tahun 2023 sebanyak 71 kelompok dan tahun 2024 sebanyak 73 kelompok.
3. Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon pada tahun 2020 sebanyak 97 kelompok, tahun 2021 sebanyak 100 kelompok, tahun 2022 sebanyak 100 kelompok, tahun 2023 sebanyak 100 kelompok dan tahun 2024 sebanyak 100 kelompok.

Costumer Perspective

Sasaran strategis ke-tiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah Desa mitra yang menerapkan Iptek KP pada tahun 2020 sebanyak 1 paket, tahun 2021 sebanyak 1 paket, tahun 2022 sebanyak 1 paket, tahun 2023 sebanyak 1 paket dan tahun 2024 sebanyak 1 paket.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis ke-dua (SS-3) yang akan dicapai adalah "kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat", dengan indikator kinerja:

1. Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri pada tahun 2020 sebanyak 60 % dari target pelatihan, tahun 2021 sebanyak 60 % dari target pelatihan, tahun 2022 sebanyak 60 % dari target pelatihan, tahun 2023 sebanyak 60 % dari target pelatihan dan tahun 2024 sebanyak 60 % dari target pelatihan.
2. Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) pada tahun 2020 sebanyak 5 orang, tahun 2021 sebanyak 10 orang, tahun 2022 sebanyak 17 orang, tahun 2023 sebanyak 18 orang dan tahun 2024 sebanyak 20 orang.
3. Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 0 orang, tahun 2021 sebanyak 0 orang, tahun 2022 sebanyak 300 orang, tahun 2023 sebanyak 350 orang dan tahun 2024 sebanyak 400 orang.
4. Masyarakat KP yang dilatih pada tahun 2020 sebanyak 1.165 orang, tahun 2021 sebanyak 2.893 orang, tahun 2022 sebanyak 2.893 orang, tahun 2023 sebanyak 2.893 orang dan tahun 2024 sebanyak 10.000 orang.
5. Pelaksanaan pelatihan masyarakat berbasis "full online training" BPPP Ambon pada tahun 2020 sebanyak 0 paket, tahun 2021 sebanyak 20 paket, tahun 2022 sebanyak 20 paket, tahun 2023 sebanyak 20 paket dan tahun 2024 sebanyak 20 paket.
6. Tersedianya materi pelatihan berbasis kajiwidya (kaji terap) di BPPP Ambon pada tahun 2020 sebanyak 0 paket, tahun 2021 sebanyak 4 paket, tahun 2022 sebanyak 4 paket, tahun 2023 sebanyak 4 paket dan tahun 2024 sebanyak 4 paket.
7. Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan pada tahun 2020 sebanyak 1 unit, tahun 2021 sebanyak 1 unit, tahun 2022 sebanyak 1 unit, tahun 2023 sebanyak 1 unit dan tahun 2024 sebanyak 1 unit.
8. Sarana dan prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2020 sebanyak 0 unit, tahun 2021 sebanyak 1 unit, tahun 2022 sebanyak 1 unit, tahun 2023 sebanyak 1 unit dan tahun 2024 sebanyak 1 unit.

9. Sertifikasi kelembagaan pelatihan dan penyuluhan sesuai standar Lembaga diklat pada tahun 2020 sebanyak 1 lembaga, tahun 2021 sebanyak 1 lembaga, tahun 2022 sebanyak 1 lembaga, tahun 2023 sebanyak 1 lembaga dan tahun 2024 sebanyak 1 lembaga.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPPP Ambon melalui Sasaran strategis ke empat (SS-4) "Tatakelola pemerintahan yang baik" dengan indikator kinerja :

1. Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2020 sebesar 72 %, tahun 2021 sebesar 76 %, tahun 2022 sebesar 76 %, tahun 2023 sebesar 76 % dan tahun 2024 sebesar 76 %.
2. Nilai rekomendasi kinerja BPPP Ambon pada tahun 2020 sebesar 0 %, tahun 2021 sebesar 80%, tahun 2022 sebesar 80%, tahun 2023 sebesar 80% dan tahun 2024 sebesar 80 %.
3. Unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar pada tahun 2020 sebesar 82%, tahun 2022 sebesar 84%, tahun 2023 sebesar 84% dan tahun 2024 sebesar 84 %.
4. Nilai Kinerja Pelaksanaan anggaran BPPP Ambon pada tahun 2020 sebesar 88% (Baik), tahun 2022 sebesar 89% (Baik), tahun 2023 sebesar 89% (Baik) dan tahun 2024 sebesar 89% (Baik).
5. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon pada tahun 2020 sebesar 86%, tahun 2022 sebesar 86%, tahun 2023 sebesar 86% dan tahun 2024 sebesar 86%.
6. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 1%, tahun 2022 sebesar 0%, tahun 2023 sebesar 0% dan tahun 2024 sebesar 0%.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengem- bangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai stategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain tekait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yeng meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
    a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan *database* kelautan dan perikanan
    b. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif,
    c. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
    d. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;
    e. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;
    f. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi
    g. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
    h. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan

i. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;

j. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan Penagrusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah :

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Gender
6. Modal Sosial Budaya
7. Transformasi Digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunansektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water yang mencakup diantaranya (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation on the Law of the Sea* (UNCLOS).

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

3.3 Dukungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Terhadap Program Kegiatan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Kebijakan yang dilaksanakan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam mendukung peran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan dan BRSDM dalam pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu:

A. Pelatihan KP

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat yang ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi masyarakat KP agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan taraf kehidupannya. Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain :

a. Mengembangan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
b. Melakukan akreditasi program dan lembaga pelatihan KP;
c. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;
d. Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
e. Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis digital talent untuk menghasilkan startup di bidang kelautan dan perikanan;
f. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online trainning*).

Tahun 2024 ditargetkan Pelatihan berstandar SKKNI & Internasional dengan langkah langkah seperti menyusun kurikulum dan modul standar nasional dan internasional guna memenuhi Persyaratan kompetensi tenaga kerja global. Selain itu di tahun 2024 juga BPPP Ambon akan ditargetkan sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

BPPP Ambon akan diinisiasi menjadi *training centre* yang spesifik seperti training centre penangkapan ikan dan *training centre* budidaya perikanan laut. Selanjutnya akan dibuat pola *container* standar berisi peralatan lengkap untuk melayani kebutuhan pelatihan-pelatihan teknis di sentra-sentra masyarakat, sebagai *mobile training center* melibatkan alumni satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai pelatih/instruktur. *Mobile training center* dapat berisi pelatihan penangkapan, permesinan, pengolahan dan budidaya.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis kompetensi, (b) Sertifikasi dan akreditasi pelatihan (c) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur). Kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam mendukung program kementerian diataranya adalah pelatihan pada masyarakat pelaku utama dan usaha.

Pelatihan dimaksudkan untuk Pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang dan mempunyai arah untuk: (a) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi mayarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (c) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional sektor KP, antara lain:

a. Menyusun rencana aksi dan tindak lanjut Permen KP tentang Lobster, memerlukan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan budidaya lobster;
b. Dukungan pelatihan terhadap strategi peningkatan produksi budidaya udang, dengan menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan budidaya udang, pelatihan pembuatan pakan, dan membangun sdm budidaya udang;
c. Strategi pencegahan dan penyebaran sampah plastik, pelatihan penanganan dan pengelolaan sampah plastik;

d. Membuat prototipe miniplant solar refrigeraton, yaitu membuat pabrik es sederhana (berfungsi sebagai cold storage dan ice flake machine) dengan sumber energi tenaga surya untuk diintegrasikan sebagai sarana pengawetan produk perikanan disentra-sentra pemasaran ikan;

e. Pelatihan kepada pelaku utama penerima bantuan pemerintah dari eselon I teknis, sebagai upaya untuk mengefektifkan bantuan bantuan yang telah diterima oleh masyarakat;

f. Pelatihan lainnya nanti yang dibutuhkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional yang ada di sektor kelautan dan perikanan;

B. Penyuluhan KP

Kegiatan penyuluhan berdasarkan kepada metoda dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui :

1) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
2) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
3) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan
4) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

a. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;
   - Peningkatan kelas kelompok mandiri
   - Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah
   - Penempatan dan penyebaran penyuluh di seketariat penyuluhan di kab/kota

- Membuat piramida model penyuluh (PNS, PPB dan Penyuluh Swadaya)

b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
   - Peningkatan daya saing penyuluh PNS
   - Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB)
   - Pembinaan Penyuluh Perikanan swadaya

c. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital;
   - Pengembangan materi *cyber extention*
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi
   - Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)
   - Membangun Sistem Penyuluhan Digital, yang memuat sistem absensi, sistem pelaporan kinerja, dan sistem konsultasi/ pendampingan
   - Membangun sistem penilaian kinerja penyuluh PNS, P3K & Swadaya berbasis lokasi (gps)
   - Membangun standar *digital library,* dengan memuat modul-modul yang lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi *Pool knowledge*

d. Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
   - Penataan sarana dan prasarana penyuluhan
   - Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan
   - Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan
   - Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja
   - Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh
   - Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun **4 (empat) sasaran pokok** dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

1) **Sasaran Pertama** Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan

diletakkan pada: (1) Perencanaan partisipatif; (2) Pelatihan dan pendampingan; (3) Tahap peningkatan skala usaha kelompok menuju UMKM KP unggulan (4) Tahap penumbuhan kelompok usaha mandiri; (5) Tahap pemantapan kelompok; (6) Tahap pengembangan kelompok; dan (7) Kegiatan pendampingan kelompok atau gabungan kelompok pada tahap pra-produksi, produksi, dan diversifikasi produk.

2) **Sasaran Kedua** Peningkatan Penguasaan Manajemen Usaha, Teknologi dan penjaminan mutu produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Penguasaan kelompok masyarakat mitra terhadap manajemen usaha; (2) Pengusaaan masyarakat mitra terhadap teknologi produksi; (3) Peningkatan mutu dan nilai tambah; (4) Segmentasi pasar dan preferensi konsumen; dan (5) Pengawasan mutu produk.

3) **Sasaran Ketiga** Pengembangan Permodalan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Mobilisasi dana bersama dalam kelompok; (2) Bimbingan pengelolaan dana bersama; dan (3) Bimbingan pengenalan sumber-sumber permodalan.

4) **Sasaran Keempat** Pengenalan dan Perluasan Pasar. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengenalan kelompok atau gabungan kelompok kepada akses pasar lokal; (2) Pengenalan pada pasar regional maupun internasional; dan (3) Pengenalan kelompok pada diversifikasi produk.

C. Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan SDM KP

Kerjasama program pelatihan dan penyuluhan KP bertujuan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dengan *stakeholder*. Kerjasama dilakukan dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, NGO atau LSM, Dunia Usaha/industri, lembaga dalam dan luar negeri, individu yang mempunyai korelasi dengan pelatihan dan penyuluhan serta *stakeholder* lainnya.

Kerjasama penyelenggaraan pelatihan diarahkan pada *Open Resources* dengan membangun Sistem Pelatihan dengan melibatkan dunia usaha dan industri (*hightech recomanded*).

Agenda kerjasama pelatihan dan penyuluhan dalam mengembangkan sistem pelatihan KP, sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Sasaran Pertama

Terpenuhinya modal usaha kelompok yang digali dari anggota kelompok itu sendiri, donatur perorangan, pemerintah daerah, lembaga donor dalam dan luar negeri, lembaga keuangan maupun perusahaan dalam rangka pemanfaatan dana tanggungjawab sosial masyarakat (CSR). Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Membuat kriteria seleksi calon anggota kelompok; (2) Sosialisasi paket-paket pelatihan unggulan dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku utama/ dan atau pelaku usaha; (3) Menjual paket pelatihan sertifikasi dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap pakai; (4) Sosialisasi paket pelatihan dalam rangka mendukung isu pemanasan global dan degradasi ekosistem pesisir; dan (5) Melakukan kerjasama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan lembaga penempatan kerja.

b. Sasaran Kedua

Terpenuhinya sarana pelatihan dan penyuluhan dari sumber-sumber pembiayaan seperti tersebut pada sasaran pertama. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama yang komplementer dan saling menguntungkan dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan tertentu yang bersumber dari pemerintah daerah maupun sumber-sumber lain dalam negeri; dan (2) Mencari dana hibah luar negeri dari lembaga donor negara sahabat dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan terkini.

c. Sasaran Ketiga

Peningkatan kapasitas SDM-KP melalui pembiayaan yang bersumber dari non APBN KKP. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama antara lembaga pelatihan dengan berbagai

lembaga donor di luar negeri dalam rangka hibah pelatihan maupun penyuluhan; dan (2) Kerjasama antar lembaga pelatihan dan penyuluhan di luar sektor perikanan dalam rangka peningkatan kompetensi antar pengelola pelatihan dan penyuluhan kedua belah pihak.

3.4 Strategi Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha mendukung masyarakat KP meningkat kesejahteraannya

Strategi 1: Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM serta program eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah

Langkah Operasional:

1. Penguatan kelembagaan pelaku usaha/masyarakat kelautan dan perikanan (penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok)
2. Menyiapkan Programa Penyuluhan Perikanan yang partisipatif, kolaboratif dan integral
3. Mendiseminasikan inovasi hasil riset teknologi kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
4. Mengembangkan sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis online
5. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan berbasis kebutuhan inovasi teknologi adaptif kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Mengidentifikasi dan memetakan teknologi kelautan dan perikanan yang dibutuhkan pelaku utama kelautan dan perikanan
7. Menyiapkan NSPK Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

8. Menyusun materi penyuluhan berbasis hasil riset inovatif
9. Melakukan penguatan sarana prasarana penyuluhan
10. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan melalui Pos Penyuluhan
11. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha
12. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan KP.
13. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama KP.
14. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (*cyber extension*); dan Temu: aplikasi, percontohan, dll.

Sasaran Strategis 2 : Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

Strategi 1: Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan

Langkah Operasional:

1. Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan industrialisasi KP.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dan diseminasi teknologi yang direkomendasikan dan inovasi teknologi adaptif lokasi.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil kajian kebijakan (*policy brief*) dalam merespon isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang sedang dan potensial berkembang.
4. Membuat percontohan percontohan penyuluhan di lokasi binaan penyuluhan yang menerapkan teknologi inovasi hasil riset.
5. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendiseminasi hasil riset yang disesuaikan dengan teknologi adaptif lokasi.

Strategi 2: Mendukung diseminasi hasil riset selaras dengan pengembangan industri kelautan dan perikanan

Langkah operasional:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan riset yang spesifik lokasi;
2. Menjalin kerja sama dengan lembaga riset dalam pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan yang saling menguatkan;
3. Membuat publikasi hasil riset dengan menggunakan bahasa penyuluhan yang lebih mudah dipahami dan menyeseuaikan dengan kebutuhan pelaku utama/pelaku usaha.

Sasaran Strategis 3 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

Strategi 1: Membangun sistem penyelenggaraan pelatihan berbasis kerjasama industri

Langkah operasional:

1. Menghasilkan lulusan pelatihan yang membentuk startup/wirausaha baru.
2. Melaksanakan perencanaan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan;
3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
4. Mengembangkan Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat;
5. Mengembangkan modul, kurikulum pelatihan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pelatih sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
7. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan diklat.
8. Meningkatkan dan mengembangkan jenis dan metode pelatihan berbasis kinerja/kompetensi;

Strategi 2 : Ikut serta dalam membangun sistem pelatihan ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kapasitas aparatur sebagai motivator dan dinamisator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) **Sasaran Pertama:** Pemenuhan kompetensi administrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi bidang administrasi, antara lain:
   a) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen perkantoran;
   b) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen keuangan;
   c) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen SDM;
   d) Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen mutu;
   e) Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen lingkungan;
   f) Penumbuhan jiwa kewirausahaan instansi pemerintah; dan
   g) Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen publik.

2) **Sasaran Kedua:** Pemenuhan kompetensi teknis substansi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada:
   a) Pengembangan kompetensi bidang penangkapan ikan;
   b) Pengembangan kompetensi bidang pembudidayaan ikan;
   c) Pengembangan kompetensi bidang pengolahan ikan;
   d) Pengembangan kompetensi bidang konservasi sumberdaya ikan;
   e) Pengembangan kompetensi bidang pengawasan perikanan;
   f) Pengembangan kompetensi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
   g) Pengembangan kompetensi bidang permesinan perikanan.

3) **Sasaran Ketiga:** Pemenuhan kompetensi fungsional. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: a) Penyuluh Perikanan; b) Arsiparis; c) Widyaiswara dan d) Instruktur.

Dengan Langkah Operasional:

1. Meningkatkan kapasitas ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi
2. Mengembangkan modul, kurikulum diklat untuk memenuhi kebutuhan diklat jabfung/teknis 20 JP setiap pegawai per tahun.
3. Menyusun Roadmap ASN BPPP Ambon
4. Menyusun Pola Karir dan Formasi ASN BPPP Ambon
5. Menyusun Peta Jabatan ASN BPPP Ambon
6. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) BPPP Ambon

Strategi 3: Membangun sistem pelatihan dan penyuluhan KP berbasis digital/Teknologi Informasi

Langkah Operasional:

1. Mengembangkan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh *e-leaning*, online training dan skema *blended training* (gabungan online training dan klasikal).
2. Menyusun NSPK pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital.
3. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pelatihan dan penyuluhan KP digital.
4. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi
5. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital (*e-learning, dan e-trainning*)

Sasaran Strategis 4 : . Tatakelola pemerintahan yang baik

Strategi : Membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan BPPP Ambon

Langkah Operasional :

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan,
2. Meningkatakan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan

Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju Satker berstatus WBK/WBBM.

3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparant, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasan terkait dengan strategi BPPP Ambon dalam mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat dijabarkan sebagaimana gambar 8. Dengan Sumberdaya yang ada, baik itu SDM yang terdiri dari pegawai pusat, widyaiswara, instruktur, pengelola pelatihan, penyuluh perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu, serta kelembagaan pusat dan UPT yang melaksanakan fungsi pelatihan dan penyuluhan serta didukung dengan anggaran yang ada, merupakan modal awal untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pada prosesnya yang menjadi prioritas adalah pelatihan aparatur dan non aparatur, peningkatan keterampilan masyarakat KP, penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok serta pembentukan lembaga kemandirian kelautan dan perikanan. Pada prosesnya akan dilakukan terus evaluasi dan monitoring untuk mendapatkan *feedback* dari *stakeholder* agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya.

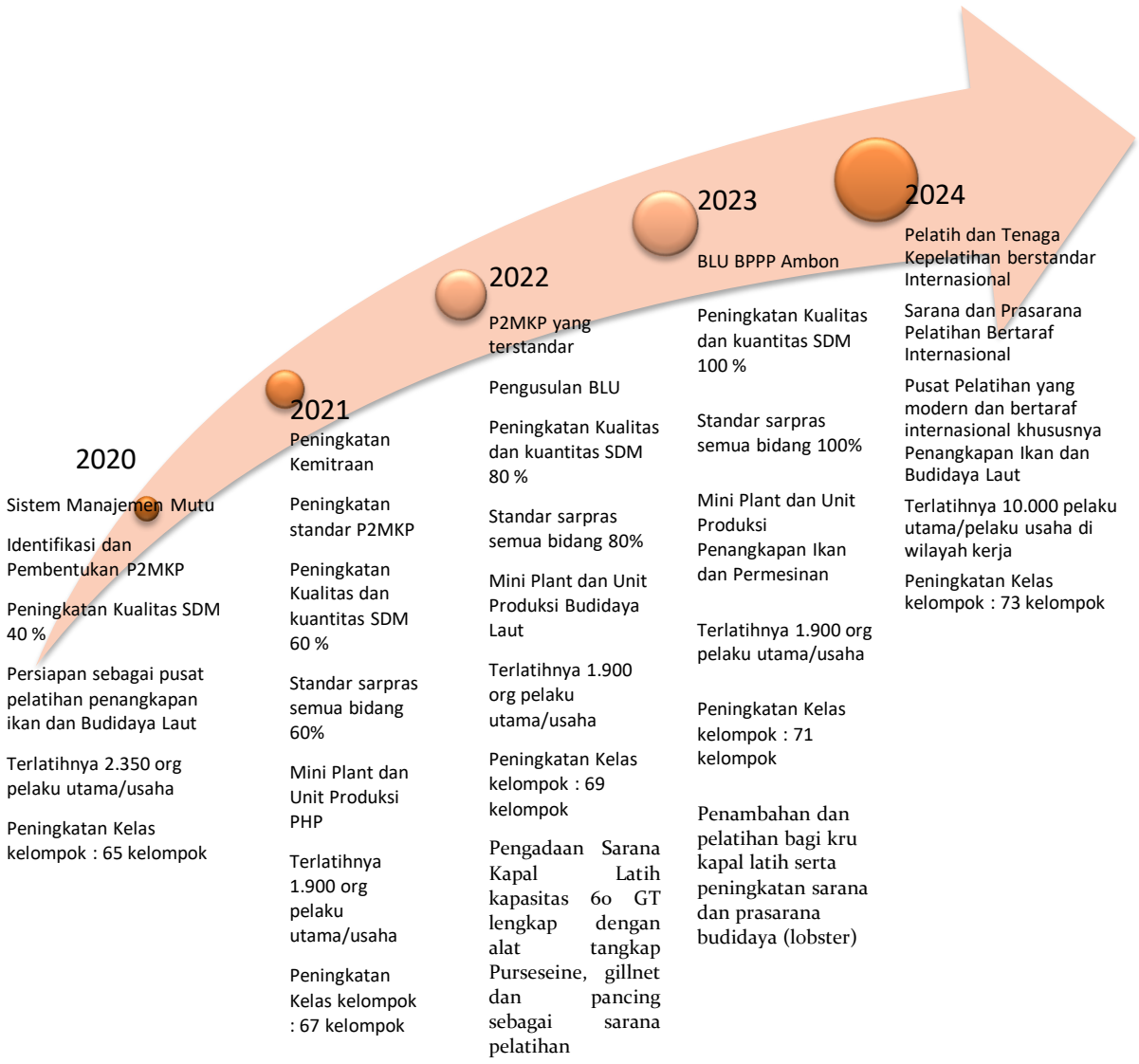

Gambar 8. Roadmap BPPP Ambon 2020-2024

Tahun 2020 fokus pada Sistem Manajemen Mutu, Identifikasi dan Pembentukan P2MKP, Peningkatan Kualitas SDM 40 %, Persiapan sebagai pusat pelatihan penangkapan ikan dan Budidaya Laut, Terlatihnya 2.350 org pelaku utama/usaha dan Peningkatan Kelas kelompok : 65 kelompok

Tahun 2021 targetnya adalah Peningkatan Kemitraan, Peningkatan standar P2MKP, Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM 60 %, Standar sarpras semua bidang 60%, pembentukan *Mini Plant* dan Unit Produksi PHP, Terlatihnya 1.900 org pelaku utama/usaha dan Peningkatan Kelas kelompok : 67 kelompok

Tahun 2022 memiliki P2MKP yang terstandar, Pengusulan BPPP Ambon menjadi Badan Layanan Umum, Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM 80 %, Standar sarpras semua bidang 80%, Pembentukan Mini Plant dan Unit Produksi Budidaya Laut, Terlatihnya 1.900 org pelaku utama/usaha, Peningkatan Kelas kelompok : 69 kelompok, Pengadaan Sarana Kapal Latih kapasitas 60 GT lengkap dengan alat tangkap Purseseine, gillnet dan pancing sebagai sarana pelatihan.

Tahun 2023 BPPP Ambon diharapkan telah menjadi BLU, Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM 100 %, Standar sarpras semua bidang 100%, Mini Plant dan Unit Produksi Penangkapan Ikan dan Permesinan, Terlatihnya 1.900 org pelaku utama/usaha, Peningkatan Kelas kelompok : 71 kelompok, Penambahan dan pelatihan bagi kru kapal latih serta peningkatan sarana dan prasarana budidaya (lobster)

Tahun 2024 diharapkan BPPP Ambon memiliki Pelatih dan Tenaga Kepelatihan berstandar Internasional, Sarana dan Prasarana Pelatihan Bertaraf Internasional, Pusat Pelatihan yang modern dan bertaraf internasional khususnya Penangkapan Ikan dan Budidaya Laut, Terlatihnya 10.000 pelaku utama/pelaku usaha di wilayah kerja dan Peningkatan Kelas kelompok : 73 kelompok

Adapun secara teknis pendetailan proses penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur pendukung dan dilaksanakan sesuai prosedur dan tahapannya. Secara garis besar penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam tiga tahapan, sebagaimana Gambar 9.

Tahap Pertama adalah Rancang Bangun Program, tahapan ini sebagai bagaian dari tahapan identifikasi kebutuhan diklat. Termasuk didalam nya adalah: Analisis jabatan, assessment untuk mengetahui tingkat kompetensi, peta kualifikasi, selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang sudah dimiliki dengan minimal kompetensi yang harus dimiliki untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Selanjutnya hasil analisis kesenjangan kompetensi tersebut menjadi dasar penyusunan program diklat yang akan diselenggarakan.

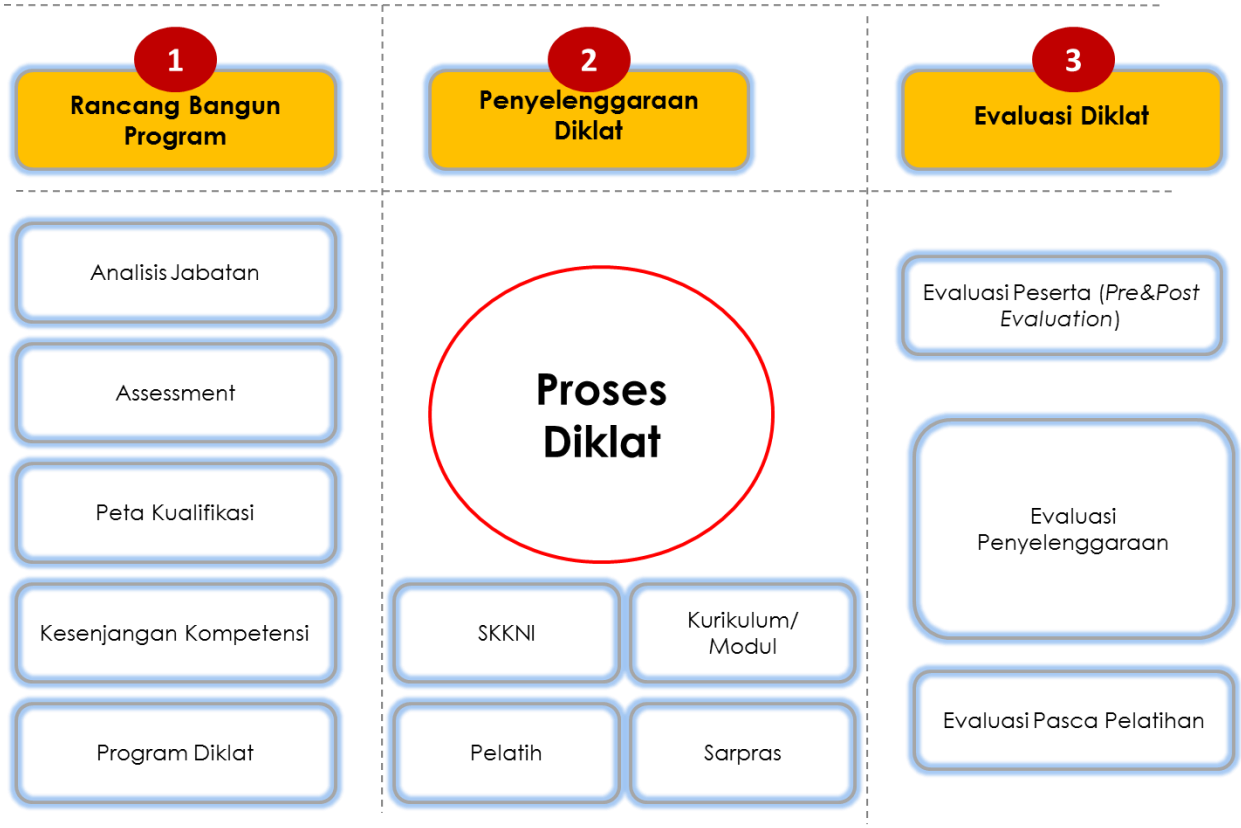

Gambar 9. Dukungan Penyelenggaraan Diklat

Tahap kedua adalah Penyelenggaraan Diklat, tahapan ini dimana tidak saja hanya tentang pelaksanaan diklat, akan tetapi juga menyangkut perangkat pendukungnya seperti SKKNI, Kurikulum dan Modul, pelatih yang terdiri atas widiyaiswara dan instruktur, serta sarana prasarana pelatihan.

Tahap ketiga adalah evaluasi diklat, evalausi menyangkut kemampuan peserta latih, *pretest* dan *post evaluation*, evaluasi penyelenggaraan diklat serta evaluasi pasca pelatihan.

Sedangkan untuk pendetailan proses penyelenggaraan penyuluhan merupakan satu kesatuan yang utuh yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagaimana Gambar 10.

Tahap Pertama, Tahap rancang bangun program yang terdiri atas pemetaan pelaku utama/usaha dan kelompoknya baik dalam hal jumlah, lokasi, identifikasi karakter sosial, budaya perorangan maupun kelompok, identifikasi jenis usaha, komoditas dan karakteristik produk yang dihasilkan, selain itu juga pemetaan penyuluh perikanan yang terdiri atas jumlah penyuluh, kompetensinya, sebarannya serta jenjang jabatannya. Selain pemetaan penyuluh dan sasaran penyuluhan, juga perlu

mempersiapkan regulasi penyuluhan KP sebagai acuan dan dasar hukum pelaksanaan penyuluhan. Kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang sudah ditarik ke pusat, tentunya harus diatur lebih lanjut operasional pelaksanaannya dan mekanisme tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

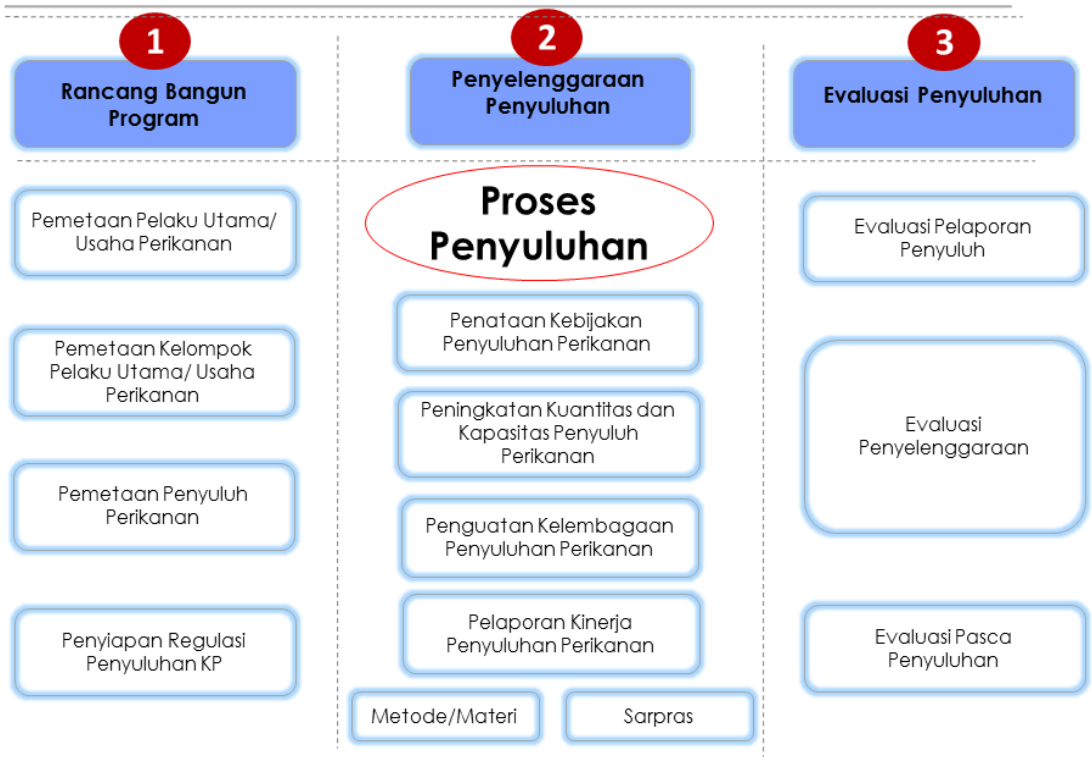

Gambar 10. Proses Penyelenggaraan Penyuluhan

Tahap Kedua adalah tahap penyelenggaraan penyuluhan. Pada tahapan ini sudah mulai dilakukan penataan kebijakan terkait penyuluhan perikanan, peningkatan kuantitas dan kapasitas penyuluh perikanan, penguatan kelembagaan penyuluhan perikanan baik kelembagaan pelaku utama maupun kelembagaan penyuluh perikanan, perancangan konsep dan format pelaporan penyuluh perikanan, metode dan materi penyuluhan yang perlu dilakukan pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan KP mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan.

Tahap Ketiga yang cukup penting adalah tahap evaluasi, baik itu evaluasi terkait pelaporan kinerja penyuluh perikanan, evaluasi penyelenggaraan penyuluhan

perikanan serta evaluasi pasca penyuluhan. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui dampak dari kegiatan penyuluhan kepada sasaran utama penyuluhan, sehingga dapat diketahui pengembangan yang dapat dilakukan agar pelaksanaan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Agenda sistem pelatihan dan penyuluhan lainnya seperti uraian dibawah ini:

1) *Strategi Pengembangan Sistem Bisnis Perikanan di Pedesaan*

Sistem Bisnis Perikanan di pedesaaan diarahkan kepada tujuan menjadikan usaha sektor KP sebagai usaha yang *profitable* dan berkelanjutan dengan pengelolaan organisasi dan keuangan yang baik. Dengan sentuhan pelatihan dan penyuluhan, diharapkan usaha-usaha sektor KP mejadi bagian dari UMKM yang mampu meningkat kelasnya dan menghasilkan produk-produk lokal unggulan yang mengarah pada ekspor. Hal ini tentunya akan mampu meningkatkan skala usaha pelaku utama/usaha, sehingga mampu meningkatkan pendapatannya, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP.

Terdapat 5 (lima) agenda pokok pengembangan Pelatihan dan Penyuluhan, yaitu:

a. Pengembangan *Sistem Pelatihan dan Penyuluhan* yang yang efisien, efektif, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
b. Peningkatan kompetensi *Aparatur* sebagai dinamisator dan motivator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan;
c. Peningkatan Kapasitas *Pelaku Utama/Pelaku usaha* sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan menuju UMKM KP yang unggul dan naik kelas;
d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan;
e. Pengembangan Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan.

Kelima agenda pokok pengembangan Pelatihan dan Penyuluhan selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Harapannya untuk mencapai UMKM KP yang meningkat kelasnya, pelatihan dan penyuluhan akan berperan dalam:

a. Identifikasi Pelaku utama/usaha yang produktif dan *feasible* ;
b. Analisis permasalahan pada kondisi wilayah dan usaha yang dikembangkan;
c. Bimbingan teknis produksi, transfer teknologi, legalitas usaha, sertifikasi dan perizinan lainnya yang mengarah pada peningkatan kemampuan teknis dan manajerial bisnis;
d. Bimbingan riset pemasaran, strategi dan keputusan bisnis;
e. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan bisnis perikanan;
f. Fasilitasi informasi Pelatihan, pemagangan, inkubasi bisnis dan peningkatan SDM lainnya; dan
g. Fasilitasi akses sumber informasi lembaga pemasaran dan lembaga keuangan (*net working*).

2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SIMLAT)

Berkaitan dengan agenda pengembangan sistem informasi manajemen pelatihan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama Pengembangan manajemen sistem informasi pelatihan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada Isi SIMLAT yang informatif dan terkini.

Sasaran Kedua Pengembangan SDM pengelola. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Peningkatan kompetensi dalam hal mengelola perangkat lunak dan perangkat keras jaringan SIMLAT (*troubleshooting*); dan (2) Peningkatan kompetensi dalam mengoperasikan SIMLAT.

Sasaran Ketiga Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi pelatihan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengembangan sarana untuk memenuhi kebutuhan minimal beroperasinya SIMLAT secara terintegrasi; dan (2) Pengembangan modul pelatihan multimedia berbasis internet.

3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH)

Berkaitan dengan agenda pengembangan sistem informasi manajemen penyuluhan, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama Pengembangan manajemen sistem informasi penyuluhan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Isi SIMLUH yang informatif dan terkini serta (2) Link SIMLUH dengan pelaporan penyuluh perikanan, Cyber extention, informasi pasar dan lain sebagainya.

Sasaran Kedua Pengembangan SDM pengelola. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Peningkatan kompetensi dalam hal mengelola perangkat lunak dan perangkat keras jaringan SIMLUH (*troubleshooting*); dan (2) Peningkatan kompetensi dalam mengoperasikan SIMLUH.

Sasaran Ketiga Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi penyuluhan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengembangan sarana untuk memenuhi kebutuhan minimal beroperasinya SIMLUH secara terintegrasi; dan (2) Pengembangan materi penyuluhan multimedia berbasis internet.

3.5 Kegiatan Prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2020- 2024, adalah :

a. Pelatihan KP

Kegiatan prioritas pelatihan pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan KP yang difokuskan pada :

1) Pelatihan Masyarakat KP
2) Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan
3) Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan
4) Sertifikasi kompetensi Masyarakat KP
5) Sarana Prasarana Pelatihan KP

b. Penyuluhan KP

Kegiatan prioritas penyuluhan KP pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan KP yang difokuskan pada :

1) Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
2) Penguatan kelembagaan kelompok KP
3) Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan izin usaha di sektor KP
4) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan
5) Sarana prasarana penyuluhan KP

3.6 Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020-2024, memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020-2024, disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan KKP, yang meliputi:

1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan;
2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Melalui Penyesuaian/*Inpassing;*
3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Mekanisme Kerja Kelembagaan Penyuluhan Perikanan;
4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penilaian dan Penetapan Kelompok Perikanan Teladan/Berprestasi Nasional Pusluh KP;
5) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

6) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
7) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perikanan;
8) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Medan, BPPP Ambon, BPPP Bitung;
9) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
10) Rancangan Permen tentang Pedoman Penyuluhan Perikanan;

Selain itu, Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BRSDM Terkait Pelatihan dan Penyuluhan KP tentang:

- ✓ Penugasan Penyuluh Perikanan PNS;
- ✓ Penetapan Kinerja Penyuluh Perikanan;
- ✓ Wilayah Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan serta Balai Riset dan Penyuluhan;
- ✓ Rancangan Induk Pengembangan (RIP) SKKNI dan KKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
- ✓ Pedoman Pelatihan Aparatur KP;
- ✓ Pedoman Pelatihan Masyarakat.

3.7 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kegiatan Pelatihan dan penyuluhan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta

masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan lebih diarahkan kepada pendampingan kepada kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Puslatluh KP

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran *(output)* dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan *(output).* Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yangsecara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat. Sasaran Strategis Program Pengembangan SDM KP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome| impact*) dari satu atau beberapa program. Rincian Indikator Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 11. Indikator Kinerja Puslatluh KP Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BRSDM	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SP 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	SK 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	kelompok	1.500	1.500	1.500	1.500
				2	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	Kelompok	2.000	2.000	2.000	2.000
2	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	SP 3. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	SK 2. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	3	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek	Paket	5	5	5	5
				4	Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	60	65	70	75
				5	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	105	115	125	155
			SK 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar	6	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	8	12	12	12
				7	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	7	12	12	12
			SK 5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh	Kelompok	41.000	43.000	49.000	55.000
				9	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	Produk	9	40	45	50
			SK 6. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	10	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Orang	29.000	36.000	50.000	58.000
				11	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "*Full Online Training*"	Paket	100	100	100	100

				12	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (Kaji Terap)	Paket	20	20	20	20
				13	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi	Orang	180	6.500	8.500	10.000
				14	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Lembaga	7	7	7	7
			SK 7. Terselenggaranya Layanan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun	NSPK	4	4	4	4
		SP 4. Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	SK. 3 Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	16	Aparatur KP yang dilatih	orang	4.280	4.725	4.800	5.000
5	SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik	SP5. Tatakelola pemerintahan yang baik	SK 8. Tatakelola pemerintahan yang baik	17	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti	Buah	8	8	8	8
				18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	%	100	100	100	100
				19	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP	Satker	1	1	1	1
				20	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Satker	1	1	1	-
				21	Nilai Rekonsilasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP	Nilai	80	80	80	80
				22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP	%	84	86	88	90
				23	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP	Indeks	73	74	75	76

				24	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Puslatluh KP	%	100	100	100	100
				25	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Puslatluh KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	65	70	75	80

4.1.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil *(outcome)* dari suatu program. Indikator Kinerja Program Puslatluh KP telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program *(outcome).* Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A.

4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Program kegiatan kerja Puslatluh KP sesuai rencana strategis tahun 2020 - 2024 adalah pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan kegiatan meliputi:

1) Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur;
2) Penyelenggaraan Pelatihan bagi masyarakat Kelautan dan perikanan;
3) Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
4) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha, terdiri dari penumbuhan kelompok perikanan dan peningkatan kelas kelompok serta pendampingan pelaku utama/usaha menjadi UMKM-KP yang mendapat kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan pembuatan ijin usaha;
5) Dukungan operasional Penyuluh Perikanan yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat KP;
6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan penyuluhan, kegiatan ini terdiri dari Pengadaan kendaraan fungsional pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, Pengadaan pengolahan Data;

7) Pengembangan Kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, meliputi Pengembangan Ketenagaan Kelautan dan Perikanan, Penyusunan Pedoman/standar/juknis/juklak, Penyusunan database, dan Penyusunan kurikulum, modul pelatihan serta metode dan materi penyuluhan;
8) Pelayanan Perkantoran, kegiatan ini terdiri dari Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penyiapan bahan-bahan pimpinanan;
9) Dokumen Perencanaan, Data informasi dan Kerjasama, kegiatan ini terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja, KAK, RAB, dan RKAKL, Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya Khusus Pelatihan dan Penyuluhan KP, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rumusan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Rapat Konsolidasi Perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan KP, Koordinasi perencanaan program dengan instansi terkait, penyusunan database dan statistik pelatihan dan penyuluhan KP, Kerjasama pelatihan dan penyuluhan dengan instansi terkait lainnya, Sistem informasi, Publikasi, dan Pameran.
10) Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi, kegiatan ini terdiri dari Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan, Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penyuluhan KP, dan Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.
11) Dokumen Ketatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara, kegiatan terdiri dari Penyusunan laporan Keuangan dan BMN, Pengelolaan Administrasi Persuratan, Penyusunan Juklak Pelaksanaan Puslatluh KP, dan PBJ.
12) Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan, kegiatan ini terdiri dari Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Implementasi SIMPEG.

4.2 Target Kinerja BPPP Ambon

4.2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Rincian Indikator Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020-2024 mengacu kepada rincian indikator kinerja Puslatluh KP adalah sebagai berikut ini:

Tabel 10. Indikator Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SS 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	kelompok	2518	2518	2873	2973	3000
				2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	kelompok	39	35	69	71	73
				3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	kelompok	97	100	100	100	100
3	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	SS 3. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	4	Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	60	60	60	60	60
				5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	5	10	17	18	20
				6	Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi	orang	0	0	300	350	400
				7	Masyarakat KP yang dilatih	orang	1165	2893	2893	2893	10000

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
				8	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training" BPPP Ambon	Paket	0	20	20	20	20
				9	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP Ambon	Paket	0	4	4	4	4
				10	Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan	unit	1	1	6	7	8
				11	Sarana dan prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	0	1	1	1	1
				12	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat	lembaga	1	1	1	1	1
4	SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	SS 4 . Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	13	Jumlah desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP	paket	1	1	1	1	1
5	SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRSDM (indeks)	Indeks	72	76	76	76	76
				15	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon	Nilai	0	80	80	80	80
				16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan	%	82	84	84	84	84

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS PUSLATLUH	NO	IKU	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
					yang terstandar lingkup BPPP Ambon						
				17	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon	Nilai	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)
				18	Nilai Kinerja Angaran BPPP Ambon	Nilai	86	86	86	86	86
				19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK (%)	%	1	0	0	0	0

4.2.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program BPPP Ambon mengacu kepada Indikator Kinerja Program Puslatluh KP telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program *(outcome).* Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A.

4.2.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan BPPP Ambon mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan Puslatluh KP. Program kegiatan kerja BPPP Ambon sesuai rencana strategis tahun 2020 - 2024 adalah pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan kegiatan meliputi:

13) Penyelenggaraan Pelatihan bagi masyarakat Kelautan dan perikanan;
14) Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
15) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha, terdiri dari penumbuhan kelompok perikanan dan peningkatan kelas kelompok serta pendampingan pelaku utama/usaha menjadi UMKM-KP yang mendapat kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan pembuatan ijin usaha;
16) Dukungan operasional Penyuluh Perikanan yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat KP;
17) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan penyuluhan, kegiatan ini terdiri dari Pengadaan kendaraan fungsional pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, Pengadaan pengolahan Data;
18) Pengembangan Kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, meliputi Pengembangan Ketenagaan Kelautan dan Perikanan, Penyusunan Pedoman/standar/juknis/juklak, Penyusunan database, dan Penyusunan kurikulum, modul pelatihan serta metode dan materi penyuluhan;
19) Pelayanan Perkantoran, kegiatan ini terdiri dari Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penyiapan bahan-bahan pimpinanan;

20) Dokumen Perencanaan, Data informasi dan Kerjasama, kegiatan ini terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja, KAK, RAB, dan RKAKL, Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya Khusus Pelatihan dan Penyuluhan KP, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rumusan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Rapat Konsolidasi Perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan KP, Koordinasi perencanaan program dengan instansi terkait, penyusunan database dan statistik pelatihan dan penyuluhan KP, Kerjasama pelatihan dan penyuluhan dengan instansi terkait lainnya, Sistem informasi, Publikasi, dan Pameran.
21) Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi, kegiatan ini terdiri dari Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan, Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penyuluhan KP, dan Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.
22) Dokumen Ketatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara, kegiatan terdiri dari Penyusunan laporan Keuangan dan BMN, Pengelolaan Administrasi Persuratan, Penyusunan Juklak Pelaksanaan Puslatluh KP, dan PBJ.
23) Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan, kegiatan ini terdiri dari Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Implementasi SIMPEG.

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pelatihan dapat bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait, APBD serta sumber lain yang tidak mengikat.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra

mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020 –2024 dan PNBP Tahun 2020 -2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Terlampir).

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan perikanan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Puslatluh KP tahun 2020 - 2024 dan perjanjian Kinerja Puslatluh KP Tahun 2021. Rencana Strategis BPPP Ambon ini disusun untuk memberikan pedoman atau panduan sesuai dengan perkembangan arah kebijakan dan peraturan terkait dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP tahun 2020-2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

Selanjutnya guna mendukung peran strategis BPPP Ambon dalam melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan melalui penataan regulasi dan peningkatan sumber daya KP.

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN AMBON,

ABU BAKAR

Lampiran I
Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180 /PER-BRSDM/2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 12/PER-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

1. KERANGKA PENDANAAN PUSLATLUH TAHUN 2021 -2024
BPPP AMBON

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM *(OUTCOME)* / SASARAN KEGIATAN *(OUTPUT)* / INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	
	TOTAL PUSLATLUH											
Program Dukungan Manajemen												
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Puslatluh KP											
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDM KP												
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I						6.14	4.66	11.2	10.7	10.7	43.4
	BPPP Ambon	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0.36*	*0.29*	*0.81*	*0.81*	*0.81*	*3.07*
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	72	73	74	75	76						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Perkantoran						549.0	461.1	507.3	511.6	514.4	
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan Lingkup Puslatluh KP (bulan)	12	12	12	12	12	527.8	442.0	467.8	467.8	467.9	2,373.4
	BPPP Ambon	12	12	12	12	12	38.1	38.2	38.2	38.2	38.2	190.7
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran Lingkup Puslatluh KP (bulan)	12	12	12	12	12	21.2	19.0	39.4	43.8	46.6	
	BPPP Ambon	12	12	12	12	12	2.2	1.9	5.0	5.5	5.5	20.1
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							**185.7**	**134.1**	**298.6**	**483.2**	**509.4**	**1,611.0**
	SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri											
	Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	60	60	65	70	75						
	SDM KP peserta diklat yang membentuk start up (usaha rintisan)											
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	25	105	115	125	155						
	Kelompok kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk											
	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						
	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500						
	Iptek hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat											
	Desa/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP (paket)	5	5	5	5	5						
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							185.7	134.1	298.6	483.2	509.4	1,611.0
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi						2.1	0.1	4.1	5.1	6.0	
	Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	3,500	180	6,500	8,500	10,000						
	BPPP Ambon	*200*		*371*	*486*	*573*	*0.12*	*-*	*0.23*	*0.29*	*0.34*	*0.99*
	Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						2.8	0.5	3.7	4.2	4.7	
	Jumlah Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Produk)	34	9	40	45	50						
	BPPP Ambon	*4*	1	5	5	5	*0.33*	*0.06*	*0.39*	*0.46*	*0.54*	
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP						90.5	87.4	112.1	141.2	147.7	
	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (Kelompok Masyarakat)	41,000	41,000	43,000	49,000	55,000	1.1					
	BPPP Ambon	*2,673*	*2,518*	*2,618*	*2,983*	*3,349*	*5.01*	*4.70*	*7.12*	*8.97*	*9.38*	*35.18*
	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						28.5	15.4	40.0	122.0	116.1	
	Jumlah Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	7	8	12	12	12						95.2
	BPPP Ambon	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3.20*	*1.10*	*7.00*	*21.00*	*20.00*	*52.30*
	Jumlah Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	0	7	12	12	12						
	BPPP Ambon	-	*1*	*2*	*2*	*2*	-	*1.60*	*8.0*	*20.0*	*19.0*	*48.6*
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih						52.0	23.2	116.0	160.0	185.6	
	Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (Orang)	25,200	29,000	36,000	50,000	58,000						
	BPPP Ambon	*2,765*	*2,893*	*4,000*	*5,560*	*6,600*	*7.63*	*2.51*	*12.88*	*17.79*	*21.12*	